

INDIKATOR KEGAGALAN NEGARA SUDAN SELATAN TAHUN 2013-2022

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ANNISAA DIVA NUGROHO

19323011

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PENGESAHAN
INDIKATOR KEGAGALAN NEGARA SUDAN SELATAN TAHUN
2013-2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam
memperoleh derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

1. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
2. Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A.Ph.D.

Tanda Tangan

Hangga Fathana
Mohammad Rezky Utama
Hasbi Aswar

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 10 Juli 2023



Annisaa Diva Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Argumen Sementara	15
1.8.1 Jenis Penelitian.....	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.8.4 Proses Penelitian	17
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB II SUDAN SELATAN SAAT KONFLIK SIPIL.....	18
2.1 Awal Mula Terjadinya Konflik Sipil Pasca Kemerdekaan	18
2.2 Kondisi Masyarakat di Sudan Selatan Tahun 2018-2022	26
BAB III ANALISIS SUDAN SELATAN SEBAGAI NEGARA GAGAL MELALUI PERSPEKTIF FAILED STATES	32
Perspektif <i>Failed States</i>	33
3.1 Ekonomi.....	33

3.1.1 Inflasi Meningkat.....	33
3.1.2 Cadangan mata uang berkurang.....	34
3.1.3 Jatuhnya PDB per kapita dan tingkat riil	35
3.1.4 Maraknya Korupsi.....	36
3.1.5 Ketidaksetaraan Ekonomi.....	37
3.2 Politik	37
3.2.1 Ketidakmampuan Pemerintah dalam memenuhi ‘political goods’	39
3.2.2 Hilangnya Legitimasi Pemerintahan	40
3.2.3 Institusi Pemerintahan Cacat	42
3.3 Intensitas Kekerasan	43
3.3.1 Perang sipil berkelanjutan yang berakar dari masalah etnis, agama, atau antarkomunal.....	44
3.3.2 Maraknya Pertempuran dan Kekerasan Massal.....	46
3.3.3 Pemberontakan Bersenjata melawan Pasukan Pemerintah.....	47
3.3.4 Meningkatnya Angka Kejahatan	48
BAB VI PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran dan Rekomendasi	53
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Negara <i>Weak, Failed, dan Collapse</i>	12
---	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Korban Jiwa Akibat Perang di Sudan Selatan Tahun 2011-2021	40
Gambar 2. Agregasi Kematian di Sudan Selatan berdasarkan Jenis Aktor	45
Gambar 3. Tingkat Kematian Warga Sipil akibat Konflik Bersenjata dan Kekerasan	46

DAFTAR SINGKATAN

CPA	: Comprehensive Peace Agreement
IGAD	: Intergovernmental Authority on Development
IPC	: Integrated Food Security Phase Classification
PDB	: Produk Domestik Bruto
R-ARCSS	: Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan
SPLA	: Sudan People's Liberation Army
SPLM	: Sudan's People Liberation Movement
SPLM-IO	: Sudan People's Liberation Movement-in-Opposition
SSLM	: South Sudan Liberation Movement
TGoNU	: Transitional Government of National Unity
UNMISS	: United Nations Mission in South Sudan
USD	: United States Dollar

ABSTRAK

Konflik antara Sudan dengan Sudan Selatan sudah terjadi selama bertahun-tahun bahkan jauh sebelum Sudan Selatan merdeka. Kemerdekaan Sudan Selatan dari Sudan pun ternyata tidak membawa begitu banyak perubahan terhadap kondisi Sudan Selatan. Kondisi Sudan Selatan nyatanya masih belum berada di level sejahtera. Perang saudara dengan Sudan yang terjadi dalam puluhan tahun ternyata memberikan masalah besar terhadap Sudan Selatan. Tidak hanya itu, hal tersebut juga diperburuk dengan ketidakmampuan Sudan Selatan dalam menciptakan pemerintahan yang dapat bersatu dan saling bekerjasama. Keanekaragaman suku dan etnis di Sudan Selatan menjadi salah satu faktor yang membuatnya tidak dapat bersatu dan justru memperparah keadaan negara sampai saat ini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan maraknya perang sipil yang terjadi bahkan antara Presiden dan wakilnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penyebab kegagalan Sudan Selatan berdasarkan indikator-indikator pada teori *failed states* Robert Rotberg.

Kata Kunci : Sudan Selatan, Kegagalan Negara, Konflik Sipil

ABSTRACT

The conflict between Sudan and South Sudan has been going on for years, even before South Sudan became independent. The independence of South Sudan from Sudan did not bring much change to the condition of South Sudan. In fact, the condition of South Sudan is still not at a prosperous level. The civil war with Sudan that has been going on for decades has turned out to be a big problem for South Sudan. Not only that, this is also exacerbated by the inability of South Sudan to create a government that can unite and cooperate with each other. The diversity of tribes and ethnicities in South Sudan is one of the factors that keeps it from being united and actually worsens the country's current situation. This can be proven by the rampant civil war that occurred even between the President and his deputy. This study aims to analyze the causes of South Sudan's failure based on the failed states theory by Robert Rotberg.

Key Words : South Sudan, Failed State, Civil War

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudan Selatan adalah negara yang baru saja merdeka di tahun 2011, tepatnya di tanggal 10 Juli. Fakta tersebut membuatnya menjadi negara paling baru di seluruh dunia. Kemerdekaan Sudan Selatan diawali dengan adanya Perjanjian Naivasha yang ditandatangani sejak 9 Januari 2005. Pemungutan suara terkait referendum mulai diambil pada tahun 2011, dimana sekitar 99% masyarakat Sudan Selatan menyetujui referendum tersebut. Di tahun 2022, Sudan Selatan memiliki jumlah penduduk lebih dari 11 juta dengan 60 grup etnis berbeda. Dua per lima populasi didominasi oleh Dinka, dilanjutkan dengan Nuer yang mendominasi satu per lima populasi, dan beberapa kelompok etnis lain seperti Azande, Anywa (Anwak), Bari, Shilluk, Kakwa, dan masih banyak lagi. Hal ini membuat negaranya menjadi salah satu negara yang memiliki keberagaman etnis paling banyak di kawasan Afrika (Spaulding, et al. 2022). Setelah memisahkan diri dari Sudan, masyarakat bersatu untuk merayakan kemerdekaan tersebut. Meskipun begitu, pada kenyataannya perayaan kemerdekaan ini tidak berlangsung lama karena tidak lama setelah merdeka, tepatnya di tahun 2013 Terjadi pertikaian antarmasyarakat yang akhirnya memicu adanya perang sipil di negaranya (BBC 2018).

Kemerdekaan Sudan Selatan yang disetujui tahun 2011 merupakan hasil dari penandatanganan *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* yang dibuat pada tahun 2005 yang menyetujui keputusan referendum Sudan Selatan dari negara Sudan dan mengakhiri perang tersebut (Spaulding, et al. 2022). Sebelumnya, Sudan Selatan merupakan bagian dari Sudan, namun ada beberapa faktor yang membuat kesatuan negara ini menjadi terbagi dua. Secara historis, pemisahan antara Sudan Selatan dan Sudan Utara dimulai sejak adanya *Turko-Egyptian Invasion* tahun 1821.

Pada kemerdekaan Sudan di tahun 1956, tidak banyak keuntungan yang dirasakan oleh wilayah selatan. Justru, wilayah selatan semakin merasa dikucilkan. Pada awal kemerdekaan sempat dibentuk republik parlementer yang pada akhirnya gagal menggabungkan wilayah selatan. Selain itu, secara politik terpinggirkan, secara ekonomi dan sosial terbelakang, secara budaya pun juga tertunduk oleh utara. Perbedaan antara wilayah utara dan selatan sebenarnya cukup signifikan. Wilayah Selatan didominasi oleh masyarakat Afrika yang cenderung memiliki nilai kebaratan dan mayoritas masyarakatnya beragama Kristen. Sedangkan wilayah utara didominasi oleh masyarakat Arab yang mayoritas beragama Muslim.

Adanya sentralisasi pemerintahan di utara membuat mereka dapat memperlakukan selatan atas kehendaknya. Saat itu pada 1985, panglima tertinggi tentara Sudan, Jenderal Ibrahim Abbud berkuasa setelah adanya kudeta yang menyingkirkan pemerintahan Abdullah Khalil. Pada masa pemerintahannya, mereka memaksakan islamisasi dan arabisasi ke selatan melalui berbagai aspek, terutama aspek pendidikan yang dibentuk untuk menghilangkan bahasa dan budaya mereka. Adanya

pemaksaan identitas Arab-Islam melalui pemerintahan otokratis yang berbasis di Khartoum membuat Sudan Selatan terpicu untuk melakukan pemberontakan.

Pada tahun 1963, terjadi Pemberontakan Anyanya yang diinisiasi oleh Sudan Selatan untuk menyerang Sudan Utara. Pemberontakan dari selatan ini dipicu oleh adanya ketidakpuasan terhadap dominasi wilayah utara yang selama ini menguasai Sudan (Cahyanti 2017). Perang Sipil Sudan ini akhirnya berakhir di tahun 1972 dengan penandatanganan resolusi perdamaian Perjanjian Addis Ababa. Meskipun begitu, tidak lama setelah ditandatangani, peperangan kembali terjadi di tahun 1983 yang terjadi antara kelompok partai politik *Sudan's People Liberation Movement (SPLM)* dari Sudan Selatan dengan Pemerintah Sudan (Kindersley & Rolandsen 2019). Pemberontakan terjadi dan menimbulkan perang sipil yang berlangsung selama 20 tahun dan berakhir di tahun 2005 dengan adanya penandatanganan *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* (Okeke et al. 2021). Setelah ditandatangani, Sudan Selatan diberi waktu enam tahun untuk memiliki otonomi dalam enam tahun, dengan adanya pungutan suara untuk suksesinya nanti. Enam tahun setelah perang sipil berakhir, Sudan Selatan resmi mendapatkan kemerdekaan dari Sudan pada Juli 2011. Keputusan ini disambut baik oleh masyarakat. Meskipun begitu, keadaan Sudan Selatan sebagai sebuah negara ternyata tidak juga membaik, bahkan setelah mereka telah merdeka.

Di tahun 2013, ada konflik antar elit politik yang mempengaruhi stabilitas negara. Konflik ini diawali dengan adanya pertikaian antara Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir dari Suku Dinka dan Wakil Presiden Riek Machar dari Suku Nuer. Saat itu, Presiden Kiir sempat menuduh wakil presiden Machar bahwa mereka akan melakukan kudeta terhadap pemerintahannya (Al Jazeera 2013). Setelah itu, Kiir memutuskan

untuk memecat Machar sebagai wakil presiden karena merasa terancam. Konflik semakin memanas karena adanya perbedaan suku diantara keduanya yang mengundang perbedaan preferensi antarmasyarakat dan menimbulkan kekacauan di negaranya. Maka dari itu, pertikaian antara kedua elit politik ini akhirnya berubah menjadi konflik etnis (Spaulding, et al. 2022). Sebelumnya, saat baru merdeka, SPLM yang diandalkan dapat menjadi perwakilan seluruh etnis di Sudan Selatan, ternyata dianggap tidak memperhatikan kelompok minoritas karena pemerintah didalamnya justru hanya berfokus untuk mempertahankan kekuasaannya (Okeke et al. 2021). Padahal, sebelumnya SPLM merupakan partai yang memimpin gerakan referendum melawan Sudan. Namun kenyataannya, setelah Sudan Selatan merdeka, pertikaian justru muncul memecah belah politik internal di dalamnya.

Setelah merdeka, gerakan pembebasan SPLM yang telah berubah menjadi partai politik utama di Sudan Selatan ini, tidak lagi memiliki sistem yang demokratis (Mehari 2016). Sebagai negara baru, tentu dibutuhkan pembentukan konstitusi pemerintahan permanen yang demokratis. Namun, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintahan Sudan Selatan. Tidak adanya konstitusi yang demokratis disini mempersulit keadaan politik internal di SPLM karena seakan pemerintahan Kiir hanya mementingkan cara untuk mempertahankan kepemimpinannya. Tidak hanya itu, adanya sistem hukum yang lemah juga membuat korupsi semakin marak terjadi.

Pertikaian ini pada akhirnya memuncak di tahun 2013, pada saat terjadinya konfrontasi antara perwira militer yang setia dengan Kiir dengan orang-orang pemerintahan yang tidak puas dengan kebijakan Kiir (Okeke et al. 2021). Presiden Kiir

menganggap bahwa konfrontasi tersebut merupakan salah satu upaya Wakil Presiden Machar untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan Kiir. Di sisi lain, Machar menuduh Kiir bahwa ia sengaja memanfaatkan kekuatannya untuk mempertahankan kekuasaannya di pemerintahan dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang diktatorial (Mehari 2016). Perang tersebut berlangsung dengan sangat sengit karena perbedaan etnis dari kedua pihak juga mengundang perpecahan di kalangan masyarakatnya. Tidak hanya itu, keberlangsungan perang sipil ini juga didukung oleh adanya intervensi dari pihak eksternal yang memiliki kepentingan dan tujuannya masing-masing dalam keterlibatannya di perang sipil tersebut, seperti Sudan yang mendukung pasukan rebel anti-pemerintah untuk melawan pemerintah Sudan Selatan secara tidak langsung karena memiliki agenda reunifikasi dengan Sudan Selatan. Selain itu, Sudan Selatan disini juga didukung oleh pasukan Uganda dalam melakukan penyerangan terhadap Sudan (Cahyanti 2017).

Saat ini, kondisi Sudan Selatan masih belum bisa pulih dari konflik sipil berkepanjangan yang terjadi. Dalam analisis *fragile state index* yang ditulis oleh *The Fund for Peace*, Sudan Selatan sebagai negara gagal menduduki peringkat ketiga di dunia. Kegagalan Sudan Selatan ini pada dasarnya telah terlihat pada saat negaranya berselisih dengan Sudan. Perang sipil yang terjadi selama puluhan tahun tentu berperan besar pada kondisi Sudan Selatan saat ini. Dampak konflik tersebut berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi dan masyarakat Sudan Selatan. Pada dampak ekonomi, faktor agrikultur memiliki peran besar dalam perekonomian negaranya. Sekitar 95% populasi masyarakatnya mengandalkan sektor agrikultur untuk mendukung

perekonomian, namun kondisi pasca perang menunjukkan bahwa hanya 4,5 persen dari lahan yang tersedia yang ditanami (FAO 2011). Tidak hanya itu, perang juga mempengaruhi sektor manufaktur. Kondisi Sudan Selatan yang belum pulih dari dampak peran sipil tersebut mengindikasikan awal kegagalan Sudan Selatan. Meskipun begitu, terdapat faktor lain yang juga sama pentingnya dalam mengindikasikan kegagalan negaranya. Faktor tersebut adalah kurangnya kerukunan masyarakat dan beragamnya jenis suku dan etnis di Sudan Selatan. Ketidakrukunan masyarakat awalnya sudah terlihat saat terjadinya pemisahan fraksi SPLA ditengah pertempurannya pada perang sipil kedua melawan Pemerintah Sudan. Pada saat itu, masyarakat Sudan Selatan sempat mengalami perselisihan antarsuku, dimana terdapat ribuan masyarakat dari suku Dinka yang diserang oleh kelompok suku Nuer. Penyerangan ini dimulai karena adanya perselisihan pemisahan fraksi SPLA karena adanya perselisihan antara Riek Machar dari suku Nuer dengan John Garang dari suku Dinka. Penyerangan tersebut akhirnya berdampak pada hubungan masyarakat dari kedua suku, dimana masih terdapat ketegangan diantara keduanya, bahkan sampai Sudan Selatan merdeka. Setelah menganalisis latar belakang sejarah Sudan Selatan dan indikasi kegagalan yang sudah terlihat sejak sebelum kemerdekaannya, maka penelitian ini akan dilakukan untuk mengukur indikator apa saja yang menjadi penyebab kegagalan Sudan Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Sudan Selatan mengalami kegagalan berdasarkan indikator-indikator pada *Failed States Theory*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi di pemerintahan Sudan Selatan pasca konflik sipil.
2. Untuk melihat perbedaan kondisi Sudan Selatan sebelum dan sesudah merdeka dari Sudan.
3. Untuk mengetahui penyebab Sudan Selatan menjadi negara gagal dilihat dari perspektif *Failed States Theory*.

1.4 Cakupan Penelitian

Pada tulisan ini akan dilakukan penelitian terhadap kondisi Sudan Selatan yang diteliti dengan Perspektif *Failed States* yang dikemukakan oleh Robert Rotberg, dimana teori tersebut dapat mengidentifikasi negara gagal dari indikator yang ada. Penelitian ini akan meneliti dinamika ekonomi, politik, dan sosial di Sudan Selatan setelah kemerdekaannya dari negara Sudan, dimana dampaknya tersebut masih dapat dirasakan sampai saat ini. Kondisi domestik di Sudan Selatan saat ini masih kacau. Keamanan masyarakat juga belum sepenuhnya terjamin. Hal ini dikarenakan adanya konflik sipil antar elit politik yang terus menerus terjadi. Penelitian ini akan membahas kegagalan Sudan Selatan dari tahun 2013-2020. Penelitian dimulai dari tahun 2013 karena pada tahun tersebut, terjadi puncak konflik di Sudan Selatan. Penelitian ini akan menganalisis kegagalan Sudan Selatan dari puncak konflik sampai setelah konflik

berakhir di tahun 2020. Penulis juga akan meneliti peran aktor eksternal dalam mempengaruhi kestabilan negara Sudan Selatan, terutama pada saat perang sipil terjadi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Melalui jurnalnya yang berjudul '*Another civil war in South Sudan: the failure of Guerrilla Government?*', Rolandsen menjelaskan tentang kegagalan pemerintahan sebagai salah satu pemicu utama adanya konflik yang terus menerus terjadi di Sudan Selatan. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa adanya perpecahan yang terjadi di dalam kepemimpinan SPLM pada pemerintahan Sudan Selatan merupakan penyebab utama terjadinya pertikaian antara elit politik. Pertikaian itu sendiri sebenarnya dipicu karena konflik dalam pemerintahan yang terjadi karena adanya struktur pemerintahan yang lemah karena sistemnya yang cenderung terfragmentasi dan adanya segmentasi etnis. Di Sudan Selatan sendiri, sistem politik Salva Kiir ini dianggap terlalu fokus pada lembaga eksekutifnya saja. Setelah merdeka, perpecahan dalam kondisi internal pemerintahan semakin terlihat karena adanya perbedaan ideologi dan pendapat yang semakin jelas, terutama terkait dengan kesepakatan pemerintah untuk berkompromi dengan rezim Khartoum di Sudan. Beberapa yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahannya, memutuskan untuk membentuk partai oposisi seperti yang dilakukan Riek Machar dalam membentuk SPLM-IO. Kepemimpinan Salva Kiir di SPLM dijelaskan memiliki sistem yang semaunya sendiri dan cenderung diktator karena keputusan yang dibuat Kiir dalam pemerintahannya mayoritas hanya dibuat secara sepihak.

Selanjutnya, terdapat jurnal yang ditulis oleh Mehari Taddele Maru, terkait dengan potensi, penyebab, serta konsekuensi Sudan Selatan apabila menjadi negara yang gagal. Dalam penelitian ini, Maru menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab Sudan Selatan sebagai negara yang gagal. Disini, Sudan Selatan digambarkan sebagai negara pra-gagal, yang berarti penyebab terjadinya krisis disini sebenarnya sudah terlihat bahkan sebelum Sudan Selatan merdeka. Maru menilai bahwa kegagalan partai SPLM/A dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, merupakan salah satu faktor utama penyebab jatuhnya sistem pemerintahan di Sudan Selatan. Sebelum kemerdekaan, SPLM yang masih menjadi gerakan pembebasan rakyat dapat menyatukan Sudan Selatan yang terdiri dari beragam etnis menjadi satu kesatuan karena adanya tujuan bersama yang memotivasi mereka untuk bersatu, yaitu untuk bebas dari Sudan. Namun, setelah kemerdekaan tercapai, gerakan SPLM berubah menjadi partai yang bertugas untuk memimpin negara, namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan disini tidak menerapkan sistem yang demokratis, membuat kestabilan politik di ujung tanduk. Maru disini berpendapat bahwa dibutuhkan transformasi konstitusional yang demokratis pada sistem politiknya di SPLM agar Sudan Selatan konflik bisa dihindari. Cakupan penelitian ini meneliti sampai tahun 2016, dimana upaya perdamaian masih belum menyelesaikan konflik tersebut.

Selanjutnya, jurnal yang berjudul '*Failure of States, Fragility of States, and the Prospects of Peace in South Sudan*', yang ditulis oleh Okeke, et al. menganalisis kegagalan negara Sudan Selatan dengan melihat kekurangan apa saja yang dimiliki pemerintahan Sudan Selatan jika dibandingkan dengan definisi negara ideal yang seharusnya dan juga memperkirakan bagaimana masa depan Sudan Selatan jika konflik

terus terjadi. Jurnal ini menganalisis tentang langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk memulihkan Sudan Selatan. Disini, ia berpendapat bahwa seharusnya di Sudan Selatan mulai diterapkan sistem pensiun pada pemerintahannya, untuk memberikan kesempatan bagi generasi-generasi baru yang mungkin memiliki gaya kepemimpinan yang lebih cocok untuk Sudan Selatan. Selain itu, segala bentuk intervensi eksternal yang dilakukan secara paksa (menggunakan militer), harus dihindari karena hal ini tidak akan secara efektif dapat memberhentikan konflik yang sudah terjadi di Sudan Selatan, namun justru malah akan memperparah keadaan dan akan semakin membawa Sudan Selatan menuju ke kegagalan. Selain itu, menurutnya Sudan Selatan membutuhkan bantuan internasional yang adil untuk mengubah dan memperkuat struktur pemerintahannya.

Setelah menganalisis penelitian terdahulu, penulis dapat memastikan bahwa penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya karena penelitian ini secara garis besar akan menjelaskan penyebab kegagalan negara Sudan Selatan saat puncak konflik terjadi, sampai konflik berakhir. Faktor yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah cakupan penelitian yang akan menganalisis kondisi kegagalan negara Sudan Selatan setelah konflik berakhir. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas latar belakang kegagalan tersebut terjadi, namun pada era dimana perang sipil masih berlangsung. Selain itu, penulis juga akan menganalisis pengaruh pihak eksternal dalam menyikapi keberlangsungan konflik di Sudan Selatan. Penelitian nantinya akan melihat kondisi Sudan Selatan dari perspektif Teori *Failed States* milik Robert Rotberg, yang menilai kegagalan suatu negara dari indikator-indikator yang ada.

1.6 Kerangka Pemikiran

Gambaran ideal sebuah negara dapat didefinisikan sebagai negara yang dapat melindungi dan menjamin keamanan masyarakatnya dengan baik.. Negara pada dasarnya terdiri dari lembaga-lembaga yang dapat menentukan dan menetapkan peraturan tertentu, agar dapat mengelola masyarakat didalamnya. Lembaga tersebut dapat diartikan dengan adanya parlemen, angkatan bersenjata, dewan perwakilan rakyat, dan lain-lain, yang ada dalam suatu sistem negara (Scott & Marshall 2005).

Pada teorinya yang ditulis di buku berjudul “*Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicator*”, Robert Rotberg beranggapan bahwa pada dasarnya, negara memiliki peran besar dalam menjamin keamanan dan menyediakan keamanan tersebut untuk masyarakatnya, seperti dengan memberikan perlindungan di perbatasan agar terhindar dari penyusup, mencegah adanya invasi yang mengancam kestabilan struktur sosial negara, juga mencegah segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan keamanan masyarakatnya (Rotberg 2003, 3). Maka dari itu, peran pemerintah dan legitimasinya menjadi sangat penting dalam hal berjalannya sistem negara. Jika hal ini tidak dapat diimplementasikan dengan baik, maka akan memungkinkan suatu negara menjadi negara yang gagal.

Negara yang gagal pada dasarnya digambarkan oleh Rotberg sebagai negara yang memiliki kondisi tertentu dimana negara dinilai tidak lagi mampu menjalankan tugasnya secara *proper* karena seharusnya negara memiliki alat politik yang positif dan stabil untuk menjamin keamanan masyarakatnya (Rotberg, 2003). Apabila suatu negara tidak memiliki hal tersebut, maka legitimasi pemerintahannya jadi melemah karena ketidakpercayaan masyarakat ke pemerintah dalam menjamin keamanan

masyarakat. Tidak hanya itu, adanya kekerasan internal yang terjadi secara berkelanjutan juga lama-kelamaan akan dapat membuat suatu negara terindikasi sebagai negara gagal karena hal tersebut melemahkan legitimasi pemerintah. Memahami dengan tepat mengapa negara-negara lemah menuju ke arah kegagalan akan membantu para pembuat kebijakan merancang metode-metode untuk mencegah kegagalan dan, dalam kasus negara-negara yang gagal (atau runtuh), untuk menghidupkan kembali negara-negara tersebut dan membantu dalam proses pembangunan kembali. Dalam bukunya, Rotberg menjelaskan indikator-indikator apa saja yang dimiliki oleh negara lemah, gagal, dan runtuh.

Tabel 1. Perbandingan Negara *Weak*, *Failed*, dan *Collapse*

No.	Indikator	<i>Weak</i>	<i>Failed</i>	<i>Collapse</i>
1.	Ekonomi	Inflasi meningkat	Inflasi meningkat	
		Cadangan mata uang berkurang	Cadangan mata uang berkurang	
		PDB per kapita menurun	Jatuhnya PDB per kapita dan tingkat riil	
		Angka korupsi tinggi	Maraknya korupsi	
			Ketidaksetaraan ekonomi	
2.	Politik	Amandemen yang tidak dapat diatur	Ketidakmampuan pemerintah memenuhi ' <i>political goods</i> '	Adanya kekosongan otoritas
		Despotisme	Hilangnya legitimasi pemerintahan	Aktor sub-negara mengambil alih negara
		Adanya ' <i>Internal Antagonism</i> '	Institusi pemerintahan cacat	Dasar negara tidak lagi berfungsi
		Badan peradilan tidak berfungsi		
3.	Intensitas Kekerasan	Adanya potensi disintegrasi dan kekerasan	Perang sipil berkelanjutan yang berakar dari masalah	

		karena ketegangan etnis, agama, dan antarkomunal	etnis, agama, atau antarkomunal	
		Invasi eksternal	Maraknya pertempuran dan kekerasan massal	
		Pemberontakan dan kerusuhan meningkat di beberapa daerah	Pemberontakan bersenjata melawan pasukan pemerintah	
			Meningkatnya angka kejahatan	

Sumber : Robert Rotberg (2003)

Berdasarkan tabel tersebut, Rotberg mengkategorikan kondisi negara menjadi tiga kategori, yaitu negara *weak*, *failed*, dan *collapse*. Dalam menentukan penyebab kegagalan suatu negara, Robert memberikan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis hal tersebut. Indikator utama dalam hal ini adalah ekonomi, politik, dan intensitas kekerasan.

Pertama, ekonomi. Hal ini dapat diukur dari beberapa hal, salah satunya adalah penurunan angka per kapita dari PDB tahunan. Negara gagal akan cenderung memiliki angka PDB yang terus menurun dari tahun ke tahun. Selain itu, ada faktor tingginya inflasi. Tingkat inflasi di Sudan Selatan sempat mencapai lebih dari 600%. Sebagai perbandingan, *The Federal Reserve* mengatakan bahwa persentase inflasi yang normal adalah 2%. Ditambah lagi dengan korupsi yang terjadi dalam skala destruktif. (Rotberg 2003, 8). Di sisi lain, angka kematian bayi yang tinggi juga dapat menjadi indikator kegagalan negara, dinilai dari kenaikan rasio kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

(Rotberg 2003, 20). Selain itu, negara gagal biasanya memiliki ekonomi tertutup yang bahkan sama sekali tidak memiliki keterbukaan terhadap perdagangan internasional.

Kedua, politik. Rotberg beranggapan bahwa suatu negara akan gagal ketika pemerintahannya mulai kehilangan legitimasi. Institusi pemerintahannya cacat karena tidak semua lembaga pemerintahan dapat berfungsi. Adanya pemerintah negara berfungsi untuk mengatur dan melindungi masyarakatnya. Terkait demokrasi, sistem demokrasi parsial akan jauh lebih rentan terhadap tipe kegagalan negara. Hal ini dikarenakan negara yang tidak sepenuhnya demokratis berarti menandakan pemerintah yang tidak dapat mengakomodasi tantangan politik di negaranya secara efektif (Rotberg 2003, 20).

Ketiga, intensitas kekerasan. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa semakin besar dan semakin lama durasi konflik yang melibatkan kekerasan terjadi, maka kemungkinan negara akan gagal juga semakin besar. Robert menjelaskan bahwa intensitas kekerasan bukan faktor utama yang menjadikan suatu negara dapat disebut gagal, melainkan akar masalah penyebab kekerasan yang dapat menentukan seberapa besar pengaruh kekerasan ini akan mempengaruhi kegagalan negara. Adanya perang saudara di suatu negara yang permasalahannya berakar dari pertikaian antar-etnis, agama, bahasa, atau permasalahan antar-komunal lainnya merupakan salah satu indikator kekerasan yang dapat membawa negara menuju ke kegagalan, Di sisi lain, tanpa legitimasi pemerintah, maka hukum juga akan melemah. Lemahnya hukum dapat memicu peningkatan kekerasan kriminal. Hal-hal tersebut dapat memicu negara menjadi gagal karena kekerasan yang terjadi tanpa henti (Rotberg 2003, 5).

Dari indikator-indikator diatas, hal tersebut nantinya akan dapat mengukur kegagalan suatu negara. Pada dasarnya, tidak ada indikator tunggal spesifik yang dapat memastikan bahwa negara sedang menuju ke kegagalan. Namun, indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur seberapa serius negara tersebut untuk mengalami kegagalan. Apabila suatu negara mengalami semua masalah yang disebutkan pada indikator diatas, maka ada kemungkinan negara tersebut menjadi negara gagal.

1.7 Argumen Sementara

Kegagalan Sudan Selatan dapat dilihat dari kondisinya saat ini. Dari segi ekonomi, GDP per capita Sudan Selatan di tahun 2020 mencapai \$486.946 (IMF 2022). Angka ini termasuk sangat kecil dibandingkan dengan negara Afrika lainnya yang setidaknya telah mencapai angka \$500. Dilihat dari *Multidimensional Poverty Index*, sekitar 91.9% populasi masyarakat di Sudan Selatan terhitung miskin secara multidimensional (UNDP 2022). *Fragile States Index* juga menempatkan Sudan Selatan sebagai peringkat ketiga.

Dari segi politik, Sudan Selatan dari awal sebelum kemerdekaannya tidak memiliki pemerintahan yang baik. Institusi pemerintahan Sudan Selatan cacat karena tidak adanya legitimasi pemerintah dan tidak semua lembaga pemerintahan berfungsi dengan baik. Dilihat dari indikator kekerasan, adanya konflik sipil yang didasari oleh permasalahan etnis merupakan faktor utama yang membuat kekerasan terus menerus terjadi di Sudan Selatan dan mempengaruhi negaranya secara ekonomi, politik, dan sosial. Data-data tersebut membuktikan bahwa dari semua indikator yang dimiliki,

Sudan Selatan termasuk ke negara gagal. Pasca perang sipil, Sudan Selatan belum juga pulih. Indikator-indikator tersebut menjadi alasan utama mengapa Sudan Selatan menjadi negara gagal.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif dalam melakukan analisis. Penelitian dengan metode kualitatif didefinisikan oleh Strauss dan Corbin sebagai penelitian yang menggunakan literatur terdahulu untuk menjadi latar belakang dari penelitian. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk meneliti hal-hal yang non-matematis, sehingga akan cocok untuk digunakan pada penelitian ini.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian kali ini dalam menganalisis kegagalan negara Sudan Selatan adalah pemerintah Sudan Selatan yang menjadi aktor penting dalam memimpin Sudan Selatan. Sedangkan objek penelitian disini adalah kondisi Sudan Selatan secara keseluruhan, yang dilihat pada masa pasca kemerdekaan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis akan menggunakan data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data atau tulisan yang digunakan untuk melengkapi penelitian, yang biasanya berupa tulisan atau laporan seperti jurnal, buku, artikel, dan lainnya.

1.8.4 Proses Penelitian

Pada proses penelitian, penulis akan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Sudan Selatan pasca kemerdekaannya, lalu menganalisis kondisi Sudan Selatan sebagai negara yang gagal dari data-data yang telah dikumpulkan.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB I, dalam bab ini akan berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, cakupan penelitian, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini akan membahas tentang kondisi Sudan Selatan setelah merdeka dan pengaruh intervensi asing dalam keberlangsungan konflik di Sudan Selatan. Kondisi negara ini juga nantinya akan dilihat berdasarkan kondisi ekonomi, politik, dan sosial.

Bab III, bab ini akan menjelaskan penerapan teori *Failed States* untuk menganalisis kondisi Sudan Selatan sebagai negara yang gagal. Setelah itu, akan dibahas keefektifan upaya intervensi dari luar, baik itu negara ataupun organisasi internasional yang terlibat dalam upaya untuk menyelesaikan konflik di Sudan Selatan.

Bab IV, pada bab ini akan dibahas kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

SUDAN SELATAN SAAT KONFLIK SIPIL

Bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi Sudan Selatan setelah merdeka dari Sudan. Pembahasan pada bab ini akan menjadi gambaran yang dapat digunakan untuk melihat kondisi Sudan Selatan dan masyarakatnya pasca konflik sipil terjadi. Dilihat dari sejarahnya, Sudan Selatan sebelumnya berada pada kondisi yang dianggap terkucilkan karena ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintahan Sudan yang memimpin sebelumnya. Hal ini mendorong Sudan Selatan untuk mengajukan referendum untuk merdeka dari Sudan dan mendirikan negaranya sendiri. Faktor lain seperti perbedaan suku, ras, agama, juga budaya antara Sudan Utara dengan Sudan Selatan juga memperkuat alasan referendum Sudan Selatan tersebut. Pada sub-bab pertama nantinya akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan proses referendum Sudan Selatan dan juga membahas tentang awal mula terjadinya konflik sipil di Sudan Selatan. Pada sub-bab kedua, akan dijelaskan juga kondisi masyarakatnya saat konflik dan setelah konflik terjadi.

2.1 Awal Mula Terjadinya Konflik Sipil Pasca Kemerdekaan

Kemerdekaan Sudan di tahun 1956 disambut baik oleh masyarakat. Meskipun begitu, masyarakat yang tinggal di wilayah Sudan Selatan justru tidak merasakan kemerdekaan tersebut karena adanya kesenjangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Sudan saat itu terhadap wilayah Sudan Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh tindakan-tindakan tidak adil yang dilakukan oleh Khartoum terhadap Sudan Selatan. Tindakan

seperti eksploitasi perdagangan budak, eksploitasi ekonomi, pengabaian, kurangnya otonomi di wilayah selatan, dan masih banyak lagi, merupakan beberapa contoh hal yang dilakukan oleh pemerintah Sudan terhadap masyarakat di Sudan Selatan. Beberapa bulan sebelum merdeka, perang saudara antara Sudan dengan Sudan Selatan dimulai. Dalam hal ini, wilayah Selatan menuntut representasi wilayah yang lebih luas dan otonomi daerah yang lebih besar. Kemerdekaan di tahun 1956 justru memperburuk keadaan karena pemerintah Sudan justru semakin berani untuk menekan wilayah selatan. Hal ini mengundang adanya pemberontakan yang diinisiasi oleh masyarakat Sudan Selatan untuk menyerang Sudan. Perang saudara pertama di Sudan ini terjadi selama 17 tahun, dan mengorbankan lebih dari 500,000 orang meninggal dunia (Hackett 2019). Perang tersebut semakin memanas karena adanya pemberontak Anyanya yang mendukung kemerdekaan Sudan Selatan. Selain itu, terdapat juga pembentukan *South Sudan Liberation Movement (SSLM)* pada tahun 1971 yang dibuat oleh Joseph Lagu dengan tujuan untuk mengorganisir rencana pergerakan separatis Sudan Selatan dan mendukung kemerdekaannya dari Sudan. Semua pemberontak yang mendukung Sudan Selatan dikumpulkan menjadi satu gerakan tersebut. Pembentukannya ini memperpanjang konflik karena memicu perselisihan politik dengan pemerintah Sudan (Momodu 2020).

Dalam upaya perdamaian, pada akhirnya terdapat penandatanganan perjanjian Addis Ababa di tahun 1972 untuk menghindari pemberontakan berkelanjutan. Perjanjian ini ditandatangani oleh pihak pemerintah Sudan dengan pihak SSLM. Perjanjian ini rencananya dibuat untuk mengatur ulang otonomi daerah dengan

memberikan semi-otonomi Sudan Selatan melalui pemerintah daerah. Penandatanganan perjanjian ini dapat memungkinkan untuk memberhentikan perang dan mengembangkan pembangunan ekonomi di Sudan karena adanya pengalokasian dana yang sebelumnya digunakan untuk perang saudara, diubah untuk membangun ekonomi negara. Selain itu, Sudan Selatan juga mendapat kesempatan untuk membentuk pemerintahan otonomi yang memiliki otoritas di seluruh wilayah Sudan Selatan, dan adanya kekuasaan baru dari *High Executive Council* yang bertugas untuk mengurus tata daerah Sudan Selatan. Tidak lama setelah disetujui, perjanjian tersebut nyatanya tidak berjalan sebagaimana semestinya karena ketidakmampuan masyarakat Sudan Selatan dalam mengutamakan persatuan dan minimnya kesadaran mereka terutama dalam hal bersatu secara politik (Hilde 2016).

Kegagalan dalam perwujudan perjanjian Addis Ababa mengundang perang kembali terjadi. Di tahun 1983, kaum fundamentalis islam di wilayah Sudan Utara tidak setuju dengan adanya pemberian otonomi khusus terhadap Sudan Selatan. Pada akhirnya, otonomi khusus ini dihapus karena Presiden Sudan saat itu, Nimeiry, menyatakan bahwa Sudan adalah negara Islam yang akan menegakkan hukum Islam di seluruh wilayahnya, termasuk Sudan Selatan (Hackett 2019). Tidak hanya itu, pemerintah Sudan juga melanggar perjanjian Addis Ababa karena mereka menemukan minyak dalam jumlah besar di daerah Selatan. Protes dari masyarakat Sudan Selatan akhirnya membawa perlawanan terhadap pemerintah Sudan untuk menunjukkan kekecewaannya yang menganggap bahwa realisasi perjanjian Addis Ababa ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Adanya pelanggaran dalam pemerintahan otonomi

yang dijanjikan Sudan, juga adanya pengabaian perkembangan sosial dan ekonomi Sudan Selatan, dan adanya intervensi dalam pemilihan umum mengakibatkan perang saudara kedua Sudan (Hilde 2016). Perang yang terjadi dengan Sudan ini jika ditotal telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun, mengorbankan sekitar 2 juta orang tewas dan lebih dari 4 juta penduduk kehilangan tempat tinggalnya (Momodu 2020).

Dalam perang tersebut, SPLA merupakan kekuatan militer utama dalam pemberontakan ini. SPLA membentuk SPLM dan sejak tahun 1983, fraksinya terbagi menjadi 2 fraksi utama, yaitu fraksi SPLA Torit yang dipimpin oleh John Garang yang berasal dari suku Dinka, dan fraksi SPLA-Nasir yang dipimpin oleh Riek Machar yang berasal dari suku Nuer. Perpecahan fraksi ini mengintensifkan pertempuran di Selatan karena adanya faktor seperti mobilisasi berdasarkan garis etnis, pergeseran hubungan eksternal, dan adanya perebutan kekuasaan (Hackett 2019). Perpecahan antara kedua suku sebenarnya sudah mulai semakin terlihat saat adanya perpecahan SPLA tersebut. Pada tahun 1991, tepat pada saat perang sipil masih berlangsung, sempat terjadi pertikaian antara John Garang selaku pemimpin SPLA dan Riek Machar yang saat itu berperan sebagai komandan senior SPLA. Dalam hal ini, pada dasarnya Machar tidak mendukung gagasan Garang terkait konsep '*New Sudan*' nya yang ingin menyatukan Sudan. Sebaliknya, Machar justru menginginkan Sudan Selatan yang berdiri sendiri sebagai suatu negara dan memisahkan diri dari Sudan. Hal ini akhirnya memicu pertikaian. Machar memutuskan untuk keluar dari SPLA dan membentuk fraksinya sendiri, yaitu SPLA-Nasir. Fraksi Nasir ini didominasi oleh pengikut dari Suku Nuer. Perpecahan ini yang akhirnya semakin memanas dan memicu aksi pembunuhan yang

dinamakan ‘*Bor Massacre*’. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan oleh para pemberontak dari SPLA-Natsir dan kelompok militan *Nuer White Army* dari suku Nuer yang mana serangannya ditujukan untuk suku Dinka, suku asal John Garang. Pembantaian ini akhirnya mengakibatkan sekitar 2000 orang meninggal (Copnall 2014). Perpecahan antarsuku, terutama antara Dinka dan Nuer memang sudah terlihat jauh sebelum kemerdekaan. Selain karena adanya ‘*Bor Massacre*’ yang berperan besar pada hubungan antara Dinka dan Nuer, sebelumnya kedua suku tersebut bahkan sering menyerang satu sama lain. Di tahun 90an misalnya, sering terjadi persaingan perebutan lahan penggembalaan dan air untuk ternak. Tidak banyak korban jiwa yang diakibatkan dari perang ini karena bentrokan terjadi dalam konteks lokal, namun hal ini tentu menjelaskan hubungan terkini kedua suku tersebut.

Di tahun 2005, terdapat penandatanganan CPA yang disetujui oleh rezim Omar Hassan al-Bashir dengan SPLA/M sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian. Perjanjian ini dibuat dengan adanya sedikit harapan yang dapat membuat Sudan kembali bersatu. Saat itu, John Garang, pemimpin dari SPLM, merupakan salah satu orang yang berperan penting dalam mengimplementasikan tujuan dari perjanjian tersebut, yaitu untuk bersatu kembali dengan menciptakan “*New Sudan*”. Gagasan ini sayangnya gagal diimplementasikan karena Garang meninggal karena kecelakaan di tahun 2005 dan ketua baru SPLM, Salva Kiir, memutuskan untuk memisahkan Sudan Selatan dari Sudan (Sullivan 2006). Sejak penandatanganan CPA di tahun 2005, perjanjian ini memberikan *interim period* selama enam tahun yang dapat digunakan untuk membuat Sudan bersatu. Setelah enam tahun, pada akhirnya Salva Kiir dapat

meyakinkan masyarakatnya untuk mendukung referendum. Tanggal 9 Juli 2011 akhirnya resmi dianggap sebagai hari kemerdekaan bagi Sudan Selatan. Kemerdekaan Sudan Selatan ini tidak sepenuhnya memberikan kebebasan dan kebahagiaan negaranya, melihat sejarah konflik berkepanjangan yang terjadi antara Sudan Selatan dengan Sudan. Setelah merdeka, Sudan Selatan dengan Sudan nyatanya masih memiliki masalah eksternal terkait perbatasan dengan Sudan. Di tahun 2012 bahkan terdapat Krisis Heglig, yang mana krisis ini terjadi karena Sudan Selatan sempat berkonflik dengan Sudan, atas wilayah kaya minyak yang terletak di sekitar perbatasan antara Sudan dengan Sudan Selatan, tepatnya di kota perbatasan kecil Heglig (BBC News 2012). Konflik ini selesai pada September 2012.

Meskipun masalah eksternal sudah selesai, namun kondisi Sudan Selatan setelah merdeka tidak juga membaik. Sudan Selatan masih sangat tidak stabil jika dilihat dari kondisinya setelah merdeka dari Sudan. Hal ini terutama diakibatkan dari adanya berbagai aksi kekerasan yang terjadi antarmasyarakat. Sudan Selatan memang terkenal sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku. Selain karena perbedaan ini mengakibatkan adanya perpisahan antara Sudan dengan Sudan Selatan, keanekaragaman etnis nyatanya juga masih menjadi masalah besar bagi Sudan Selatan bahkan setelah mereka bersatu untuk merdeka. Masalah tersebut tentu menjadi tantangan besar bagi Sudan Selatan untuk membangun identitas nasional. Sesaat setelah kemerdekaannya di tahun 2011, terdapat insiden kekerasan antar-komunitas di negara bagian terbesar di Sudan Selatan, Jonglei. Insiden ini diawali dengan adanya anggota bersenjata kelompok etnis Lou-Nuer yang menyerang tempat tinggal suku

Murle di wilayah Pibor di negara bagian Jonglei. Serangan ini dilakukan sebagai pembalasan dari serangan yang dilakukan oleh kelompok Murle terhadap Nuer di wilayah Uror. Penyerangan tersebut menewaskan sekitar 700 orang (UNMISS 2013).

Kasus tersebut membuktikan bahwa tidak hanya masalah eksternal, Sudan Selatan juga masih marak dengan masalah internal yang menyangkut etnis dan suku meskipun setelah negaranya merdeka. Suku Dinka dan Nuer merupakan salah satu suku dengan populasi terbanyak di Sudan Selatan. Setelah kemerdekaan Sudan Selatan pada 9 Juli 2011, Salva Kiir yang berasal dari suku Dinka dan sebelumnya berperan sebagai pemimpin SPLM/A, dipilih untuk menjadi Presiden Sudan Selatan. Sedangkan Riek Machar dari suku Nuer yang sebelumnya adalah komandan senior di SPLA, berperan sebagai wakil presidennya. Kiir menunjuk Machar sebagai wakil presiden dengan harapan bahwa ia dapat mempersatukan kedua kelompok etnis yang saling bertentangan ini untuk dapat berbagi kekuasaan (Al Jazeera 2014).

Masyarakat Sudan Selatan sebelum merdeka sempat bersatu untuk saling bekerjasama memperjuangkan kemerdekaan. Namun tidak lama setelah kemerdekaannya, perpecahan antarmasyarakat yang didasari oleh konflik sipil masih terus terjadi, bahkan semakin meningkat. Puncak konflik sipil di Sudan Selatan terjadi di tahun 2013, dua tahun setelah merdeka. Pada akhir tahun 2012, Kiir sempat mendengar rumor bahwa Machar sedang merencanakan kudeta pemerintahannya agar ia bisa mencalonkan diri sebagai presiden untuk merebut posisi Kiir. Tuduhan ini ditujukan tepat ketika partai sedang mempersiapkan Konvensi Nasional SPLM yang membahas tentang pemilihan presiden tahun 2015, batasan masa jabatan ketua SPLM,

pembentukan UUD dan kode etik, dan lainnya. Pada Januari 2013, Kiir sudah mulai mengganti inspektur jenderal kepolisian nasional dan memberhentikan enam wakil kepala staf beserta 29 mayor jenderal di angkatan darat (Sudan Tribune 2013) . Saat itu di bulan Juli, Presiden Kiir memutuskan untuk memecat Machar sebagai wakil presiden dan melakukan perombakan terhadap seluruh kabinetnya secara besar-besaran. Tidak hanya wakil presiden, namun semua menteri nasional beserta wakil menterinya juga ditarik jabatannya. Di sisi lain, Machar berpendapat bahwa hal tersebut tidak benar dan Kiir hanya ingin menggunakannya sebagai kambing hitam untuk membersihkan SPLM dari partai saingannya, demi menghindari adanya reformasi (BBC News 2019). Kiir dan Machar sejak awal memang memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Kiir yang sejak awal selalu berada di bawah John Garang, disatukan dengan Machar yang membentuk fraksi Nasir untuk melawan Garang. Belum lagi latar belakang suku mereka yang sejak awal selalu mengalami perpecahan, Dinka dan Nuer. Mendengar tuduhan kudeta dari Kiir, Machar secara tegas membantah tuduhan tersebut. Bantahan Machar terhadap tuduhan yang diajukan Kiir dilanjutkan dengan pemberontakan melawan Pemerintahan Kiir sekaligus dengan pemerintahan SPLM yang dipimpinnya.

Kiir dan Machar keduanya merupakan bagian dari gerakan SPLM, namun karena adanya persaingan politik internal tersebut, hal ini memicu adanya perpecahan. Pada 15 Desember 2013, Machar membentuk *Sudan People's Liberation Movement-in-Opposition* (SPLM-IO). Gerakan ini dibentuk oleh Machar sebagai bentuk protes untuk memisahkan diri dari SPLM pada tahun 2013. Pembentukan SPLM-IO ini

mengawali adanya pertikaian antara partai politik dengan SPLM, dimana anggota pengawal presiden bentrok di Juba. Konflik kian memanas pada saat kekerasan yang berasal dari para pasukan tentara penjaga dari kedua kelompok etnis Dinka dan Nuer saling serang. Kekerasan ini paling banyak terjadi di ibu kota dan serangan biasanya dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata baik polisi maupun tentara yang berasal dari Dinka dan serangan ini ditujukan oleh masyarakat Nuer. Di beberapa wilayah lain, serangan terhadap masyarakat Dinka juga dilakukan oleh kelompok Nuer secara membabi buta, salah satunya di wilayah Bentiu dan Malakal (Human Rights Watch 2014). Pertempuran ini menyebabkan adanya perpecahan antarmasyarakat dan memicu adanya potensi genosida, terutama karena adanya para pemberontak pemerintahan yang menargetkan masyarakat Dinka dan pasukan militer pemerintah yang menargetkan Nuer. Beberapa hari setelah puncak konflik terjadi, Machar bersama para tentara Nuer memutuskan untuk melarikan diri dari Juba untuk memisahkan diri.

2.2 Kondisi Masyarakat di Sudan Selatan Tahun 2018-2022

Perselisihan politik internal dan perebutan kekuasaan yang terjadi antara Presiden Kiir dengan wakilnya Machar pada akhirnya berujung pada konflik etnis yang berkepanjangan. Perang tersebut mengorbankan sekitar 400 ribu masyarakat tewas dan lebih dari 4 juta masyarakat kehilangan tempat tinggalnya (The New York Times 2023). Konflik yang berkepanjangan ini tentu memberikan dampak buruk bagi masyarakatnya. Sudan Selatan bahkan diklasifikasikan sebagai salah satu negara yang memiliki krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Pada tahun 2022, ada sekitar 9 juta masyarakat di Sudan Selatan yang masih membutuhkan bantuan kemanusiaan,

mayoritas wanita dan anak-anak menjadi korban yang paling terdampak dalam konflik ini (World Bank 2023). Kondisi Sudan Selatan setelah lebih dari satu dekade sejak kemerdekaannya, masih mengalami kerapuhan, stagnasi ekonomi, dan ketidakstabilan. Hal ini secara garis besar dapat dilihat dari perkembangan infrastruktur, pendidikan, serta pemenuhan hak terhadap perempuan dan anak yang masih terabaikan dan memprihatinkan (Human Rights Watch 2021). Konflik sipil yang terjadi memperburuk kurangnya sumber daya manusia dan peran atau legitimasi pemerintah di Sudan Selatan, yang pada akhirnya hal tersebut juga menjadi salah satu hambatan utama untuk stabilitas negaranya. Keberlangsungan perang ini tentu sangat berpengaruh terhadap masyarakat karena tidak hanya mengorbankan tempat tinggal, mereka juga harus mengorbankan nyawa, belum lagi seluruh infrastruktur dan fasilitas kesehatan maupun pendidikan yang hancur akan dampak perang.

Konflik sipil sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama pada aspek mata pencaharian mereka. Terganggunya mata pencaharian membuat masyarakat miskin semakin kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Bertani, memancing, dan beternak tidak dapat dilakukan karena kondisi berbahaya di Sudan Selatan. Harga pangan di seluruh wilayah juga menjadi tinggi dan hal ini menyusahkan masyarakat terutama bagi orang-orang yang mata pencahariannya telah hancur karena terdampak oleh ketidakstabilan politik. Di tahun 2022, lebih dari 55% populasi masyarakat atau sekitar 7 juta orang di Sudan Selatan masih mengalami ketidakamanan pangan akut tingkat tinggi, yang artinya masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan makanan (IPC 2023). Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh

Integrated Food Security Phase Classification (IPC), sekitar 55 ribu masyarakat diantaranya berada di level *Catastrophe*. Ketidakamanan pangan ini paling banyak menimpa masyarakat yang tinggal di wilayah Jonglei, wilayah terbesar di Sudan Selatan yang juga merupakan pusat pemerintahan. Krisis pangan yang terjadi merupakan salah satu dampak perang yang mana dipengaruhi oleh terhambatnya aktivitas ekonomi domestik masyarakat. Misalnya, aktivitas para petani di bidang pertanian yang harus terpaksa terhenti, padahal pertanian merupakan sumber penghidupan utama bagi lebih dari 80% kehidupan masyarakat Sudan Selatan, terutama bagi rumah tangga (Irwin-Hunt and Makoni 2022).

Penduduknya saat itu masih sangat bergantung pada impor bahan makanan pokok, bahan bakar, dan barang-barang manufaktur serta bantuan darurat. Dalam hal ini, maka kestabilan kondisi transportasi juga mempengaruhi aktivitas karena adanya peran penting dalam menjaga ketahanan pangan untuk masyarakat. Saat itu, produksi minyak di Sudan Selatan juga menurun drastis, Sejak 2013, produksi minyak juga mengalami pemerosotan. Pendapatan minyak seharusnya bisa menjadi sumber ekonomi bagi Sudan Selatan yang baru merdeka, namun dua tahun setelah konflik sipil, harga minyak anjlok dan mata uang melemah. Sudan Selatan menjadi seperti negara yang hampir tidak berpendapatan, terutama karena penurunan produksi minyak tersebut. Padahal, awalnya produksi minyak di Sudan Selatan dianggap dapat mendukung prospek ekonomi negara karena eksportnya yang menyumbang sampai sekitar 90% dari pendapatan pemerintah (Francois Sennesael and Verhoeven 2023). Maraknya pertempuran yang terus terjadi antara pemerintah dan pemberontak,

membuat ladang minyak di *Unity State* berhenti berproduksi, dan bahkan sebagian ladang *Upper Nile* juga menurun. Meskipun begitu, produksi minyak di Sudan Selatan mulai kembali dilanjutkan beberapa tahun setelah konflik terjadi.

Pada tahun 2018, terdapat penandatanganan *Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan* (R-ARCSS), yang dimediasi oleh *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD) sebagai upaya untuk memadamkan konflik kekerasan di Sudan Selatan. Dalam perjanjian ini, terdapat persetujuan untuk membentuk pemerintahan koalisi dan kesepakatan persatuan antara pemerintah Kiir dengan SPLM-IO Machar yang disebut *Transitional Government of National Unity* (TGoNU) . Pembentukan pemerintahan transisi ini berkontribusi pada pemulihan dan pembangunan perdamaian. Di sisi lain, perjanjian dan pemerintahan ini merupakan upaya untuk memulihkan ekonomi dengan kembali memulai produksi minyak (World Bank 2023).

Salah satu bukti bahwa produksi ladang minyak telah dibuka kembali adalah dengan adanya ladang minyak di *Unity State* yang kembali dipompa pada tahun 2019, lima tahun setelah produksi minyak tersebut dihentikan. Tidak lama setelah itu, terdapat temuan minyak juga di *Northern Upper Nile State*, yang eksplorasinya saat itu sempat terganggu karena perang yang terjadi. Daniel Chuang selaku direktur jenderal otoritas perminyakan, mengatakan bahwa pada akhir 2018 produksi minyak di Sudan Selatan mulai dilanjutkan kembali setelah beberapa ladang minyak yang rusak akibat bentrokan telah diperbaiki oleh pemerintah (Dumo 2019). Perekonomiannya yang melemah membuat juga Sudan Selatan menjadi sangat bergantung pada produk impor.

Oleh karena itu, kestabilan transportasi juga menjadi sangat penting untuk ketahanan pangan, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi harga pasar dan biaya distribusi kemanusiaan. Kelaparan dan keterlambatan distribusi bantuan makanan terkadang dapat memaksa penduduk untuk melakukan penjarahan dan pencurian bahan makanan pada gudang-gudang penyimpanan. Dalam upaya untuk mendongkrak anggaran negaranya, pemerintah Sudan Selatan saat itu sangat bergantung pada pinjaman dari berbagai sumber dengan alasan untuk menjamin kelangsungan hidup rakyatnya, meskipun di masa lalu anggaran yang dialokasikan pemerintah kepada rakyatnya tidak mencapai 10% dari seluruh anggaran nasional (World Bank 2023).

Selain bencana kelaparan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh perang antar suku, penduduk Sudan Selatan juga dihadapkan pada wabah penyakit yang mulai menyebar dan merenggut nyawa sebagian besar dari mereka. Para pejabat kesehatan memperingatkan bahwa wabah kolera di tahun 2014 yang telah menyebar di ibukota Sudan Selatan telah menewaskan 23 orang dan lebih dari 670 orang harus menerima perawatan. Sampai pada Desember 2017, terkonfirmasi bahwa lebih dari 20.000 kasus dicurigai dan sekitar 436 kematian dilaporkan (WHO 2018). Setelah itu, di tahun yang sama, sudah dilakukan pencegahan melalui vaksin kolera untuk mengurangi penyebarannya. Selain wabah penyakit kolera, penyakit lain yang mulai diderita oleh penduduk Sudan Selatan adalah TBC, HIV/Aids, gizi buruk dan lain sebagainya. Tercatat pada tahun 2014, 200 orang meninggal di tenda pengungsian PBB, termasuk anak-anak yang meninggal karena kurang gizi dan berbagai penyakit lainnya (VOA 2014). Kedua belah pihak yang berperang juga mulai menyerang dan menculik

perempuan serta anak-anak yang ditinggalkan oleh suami dan saudara mereka untuk kepentingan perang. HIV/Aids merupakan salah satu penyebab utama kematian diantara pengungsi, karena akses pengobatan dan kesehatan harus terganggu oleh pasukan bersenjata. Virus HIV/Aids dengan cepat menyebar karena tingginya kejahatan seksual yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun oposisi.

BAB III

ANALISIS SUDAN SELATAN SEBAGAI NEGARA GAGAL MELALUI

PERSPEKTIF FAILED STATES

Kegagalan negara biasanya terjadi karena mereka terguncang oleh kekerasan internal dan tidak dapat lagi memberikan barang-barang politik yang positif kepada penduduknya. Pemerintah mereka kehilangan legitimasi, dan sifat negara-bangsa tertentu itu sendiri menjadi tidak sah di mata dan di hati pluralitas yang tumbuh dari warganya. Kebangkitan dan kejatuhan negara bukanlah hal baru, tetapi di era modern ketika negara-negara nasional merupakan blok bangunan tatanan dunia yang sah, disintegrasi yang kejam dan kelemahan yang nyata dari negara-negara Afrika, Asia, Oseanik, dan Amerika Latin terpilih mengancam fondasi sistem negara tersebut. Norma-norma internasional yang diinginkan seperti stabilitas dan prediktabilitas dengan demikian menjadi sulit dicapai ketika begitu banyak negara-negara baru di dunia goyah antara kelemahan dan kegagalan, dengan beberapa benar-benar gagal, atau bahkan runtuh. Terlebih lagi, di masa teror, menghargai sifat dan menanggapi dinamika kegagalan negara telah menjadi pusat perdebatan kebijakan kritis. Cara terbaik untuk memperkuat negara-negara lemah dan mencegah kegagalan negara adalah salah satu pertanyaan mendesak di abad ke-21. Memahami dengan tepat mengapa negara-negara lemah menuju ke arah kegagalan akan membantu para pembuat kebijakan merancang metode-metode untuk mencegah kegagalan dan, dalam kasus negara-negara yang gagal

(atau runtuh), untuk menghidupkan kembali negara-negara tersebut dan membantu dalam proses pembangunan kembali.

Perspektif *Failed States*

3.1 Ekonomi

Dari segi ekonomi, sejak merdeka pada tahun 2011, Sudan Selatan memang masih diklasifikasikan sebagai negara miskin. Pasca konflik sipil dengan Sudan masih memberikan dampak besar bagi negaranya, terutama dalam faktor ekonomi. Beberapa tahun terakhir, tepatnya setelah tahun 2013, perekonomian di Sudan Selatan masih terus mengalami keterpurukan. Indikator-indikator yang dibuat oleh Rotberg dalam menganalisis failed states kali ini akan digunakan untuk melihat indikator kegagalan Sudan Selatan. Pada indikator ekonomi, terdapat inflasi yang meningkat, jatuhnya PDB per kapita, maraknya korupsi, dan adanya ketidaksetaraan ekonomi

3.1.1 Inflasi Meningkat

Kinerja ekonomi makro di Sudan Selatan terutama masa konflik sipil pada dasarnya dipengaruhi secara signifikan oleh adanya penutupan produksi minyak saat itu. Adanya inflasi tinggi dalam hal ini tentu memberikan kerugian perekonomian. Tidak hanya itu, adanya inflasi juga memperumit pembuat kebijakan, menciptakan adanya ketidakstabilan politik juga memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat Sudan Selatan. Pada awal tahun 2012, setahun setelah merdeka, tingkat harga barang bahkan meningkat dua kali lebih tinggi daripada sebelum referendum (World Bank 2012). Meningkatnya tingkat inflasi yang terjadi di Sudan

Selatan semakin berkembang pesat sejak tahun 2013. Saat itu, inflasi di Sudan Selatan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia hingga negaranya mencapai status hiperinflasi. Biro Statistik Nasional Sudan Selatan sempat mengatakan bahwa tingkat inflasi Sudan Selatan naik lebih dari dua kali lipat pada Juli 2016, angka tersebut mencapai 661,3%. Sebagai perbandingan, *The Federal Reserve* mengatakan bahwa persentase inflasi yang normal adalah 2% (Bahati 2016). Saat ini, pada tahun 2022, inflasi di Sudan Selatan masih berada pada level tinggi, dimana perubahan persen tahunannya masih mencapai angka 41,4% (IMF 2023).

3.1.2 Cadangan mata uang berkurang

Selain inflasi, kondisi cadangan mata uang juga berperan penting dalam menentukan kestabilan perekonomian Sudan Selatan. Dalam hal ini, mata uang Sudan Selatan juga mengalami pelemahan dan kehabisan cadangan devisa karena pound jatuh, terutama setelah Council of Ministers mengubah mata uang nasionalnya dalam upaya untuk membersihkan uang timbunan yang dianggap sebagai penyebab utama penurunan ekonomi. Namun, di sisi lain, kehabisan cadangan devisa ini juga diakibatkan oleh pendapatan minyak yang menurun dan tidak ada yang bisa dilakukan penasihat moneter untuk menghentikannya karena Sudan Selatan tidak memiliki cadangan untuk melakukan intervensi di pasar (AFP 2020). Dalam laporan pantauan mata uang yang dibuat Hanke, seorang professor di Universitas Johns Hopkins, Sudan Selatan masuk sebagai salah satu negara yang mengalami inflasi dan devaluasi mata uang terbesar terhadap Dolar Amerika Serikat sejak Januari 2020. Di tahun 2022, Sudan Selatan menempati urutan ketiga dalam daftar mata uang yang

memiliki performa terburuk di tahun 2022 karena Pound Sudan Selatan terdepresiasi secara drastis terhadap USD sebesar 51,61 % sejak Januari 2020. Pada akhir tahun 2020, \$1 yang diperdagangkan di pasar gelap mencapai 700 Pound Sudan Selatan dan 165 pound dengan kurs bank sentral (Mayen 2020). Menurut Hanke, Sudan Selatan disini dianggap sebagai negara dengan spiral kematian ekonomi yang tidak pernah berakhir. Depresiasi nilai tukar ini nantinya akan mempengaruhi operasi dan profitabilitas perusahaan. Volatilitas nilai tukar disini juga tidak hanya akan berdampak pada perusahaan korporasi besar dan multinasional saja, namun ini juga akan mempengaruhi usaha kecil dan menengah yang hanya beroperasi di negara asalnya. Sehingga, memahami resiko nilai tukar menjadi subjek penting bagi pemilik bisnis dan investor karena dampaknya besar bagi kepemilikan mereka (Oluwole 2022).

3.1.3 Jatuhnya PDB per kapita dan tingkat riil

Jatuhnya PDB dalam hal ini juga menjadi salah satu hal signifikan yang terjadi di Sudan Selatan pasca perang. PDB Sudan Selatan sempat menurun dari 13,13% dengan PDB per kapita sekitar \$1,659 di tahun 2013, menurun menjadi 3,37% dengan PDB per kapita sekitar \$1,245 di tahun berikutnya (World Bank 2016). Di tahun 2016, Sudan Selatan sempat mengalami penurunan drastis dengan PDB sekitar \$286,21. Hal ini merupakan dampak dari adanya bentrokan bersenjata antara SPLA dengan SPLM-IO yang kembali terjadi di Juba. Saat ini pada tahun 2022, PDB per kapita Sudan Selatan berada di angka \$327,9 (IMF 2023). Angka ini merupakan termasuk angka yang sangat kecil dibandingkan dengan PDB per kapita rata-rata dunia yang mencapai angka \$12,236 di tahun 2021 (World Bank 2022).

3.1.4 Maraknya Korupsi

Sejak kemerdekaannya, Sudan Selatan juga memiliki masalah dengan maraknya korupsi yang dilakukan oleh para elit politik. Pada tahun 2012, setahun setelah merdeka, total korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah disana mencapai sekitar \$4 miliar. Para pejabat yang korupsi ini biasanya menggunakan uangnya untuk membeli properti di luar negeri dengan uang tunai, yang mana uang tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pribadi mereka (Holland 2012). Padahal, di sisi lain, saat itu Sudan Selatan sedang mengalami keterpurukan karena kesulitan ekonomi yang memprihatinkan. Pada saat kondisinya yang baru merdeka, Sudan Selatan terpaksa harus menutup tambang minyak yang merupakan 98% sumber pendapatan negara. Hal ini berpengaruh besar terhadap perekonomian negara, namun para pelaku korupsi di pemerintahan masih saja terjadi. Berdasarkan analisis yang dibuat oleh *Transparency International*, dilihat melalui *Corruption Perceptions Index*, Sudan Selatan di tahun 2022 masih berada pada peringkat 178 dari 180 negara dengan kasus korupsi terbanyak di seluruh dunia. Total skor yang dimiliki Sudan Selatan hanya mencapai 13 poin dari 100 poin total keseluruhan. Indeks ini menandakan bahwa tingkat korupsi di Sudan Selatan sampai saat ini masih sangat tinggi (*Transparency International 2023*).

3.1.5 Ketidaksetaraan Ekonomi

Belum lama ini, terdapat penyelidikan yang menuduh keluarga Presiden Kiir dan para jenderal militer yang mendapatkan keuntungan hingga sekitar \$1 miliar dari uang pinjaman bentuk kredit yang seharusnya digunakan untuk memungkinkan perusahaan lokal mengimpor komoditas untuk dijual dengan harga terjangkau (Mugabi 2022). Namun, terdapat laporan yang menyatakan bahwa bantuan ini dijadikan sebagai peluang bagi para koruptor untuk mengkorupsi uang tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa di Sudan Selatan masih ada ketidaksetaraan ekonomi yang antara pejabat dengan masyarakat. Uang yang seharusnya digunakan untuk memprioritaskan dan memajukan masyarakat justru disalahgunakan untuk para pejabat. Dilihat dari nilai koefisien gini-nya, Sudan Selatan menempati peringkat ke – 32 di seluruh dunia, dengan dengan 44.1 poin dari 100 poin. Angka tersebut masih terhitung tinggi, dan hal tersebut menandakan bahwa Sudan Selatan ketidaksetaraan ekonomi masih terjadi di Sudan Selatan.

3.2 Politik

Sudan Selatan pada masa kepemimpinan John Garang sempat menerapkan ideologi sosialisme. Namun, setelah kepemimpinannya diganti oleh Salva Kiir pasca kematian Garang, Sudan Selatan mulai menerapkan ideologi liberalisme. Hal ini dapat dilihat dari adanya hubungan Sudan Selatan dengan negara-negara sayap kanan seperti Amerika Serikat. Pada tahun 2005, terdapat pengesahan konstitusi sementara yaitu *The Interim Constitution of Southern Sudan*. Dalam konstitusi tersebut dinyatakan bahwa Sudan Selatan akan membangun sistem pemerintahan yang

demokratis, multi-partai, dan tersentralisasi (Spaulding, et al. 2022). Pada tahun 2011, konstitusi ini berubah menjadi *The Transitional Constitution of The Republic of South Sudan*. Pemerintahan Sudan Selatan pada dasarnya memiliki struktur yang lengkap. Pemerintahannya memiliki badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan wakil presiden. Selain itu, kekuasaan legislatif bersifat bikameral dan terdiri dari Majelis Legislatif Nasional dan Dewan Negara. Pada badan yudikatifnya, pengadilan tertinggi adalah Mahkamah Agung. Setelah konflik sipil, terdapat penandatanganan konstitusi baru yaitu *Revitalized Transitional Government of National Unity (RTGoNU)*. Pemerintahan ini dipimpin oleh kabinet yang berisikan 35 orang yang terdiri dari presiden, empat orang wakil presiden, 35 menteri, dan 10 wakil menteri (Spaulding, et al. 2022).

Dari segi politik, tanda-tanda pertama dari disfungsi dalam sistem pemerintahan Sudan Selatan tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan diri. Presiden Salva Kiir tidak mengumumkan susunan pemerintahan pertama pasca-kemerdekaan selama lebih dari enam minggu. Kiir tampaknya sempat kesulitan untuk mengakomodasi segala bentuk kepentingan dan kelompok politik yang mengelilinginya di SPLM. Meskipun begitu, Kiir pada akhirnya berhasil membentuk pemerintahan yang dianggap mencakup beberapa orang dari partai politik lain yang berbeda darinya. Kiir dalam melantik orang-orang tersebut meyakini bahwa mereka akan bertanggungjawab atas kinerja dan penggunaan sumber daya pemerintah mereka. Tidak lama setelah itu, terjadi konflik sipil yang terjadi antar pemerintahan di tahun 2013. Akar utama dari terjadinya pertikaian ini sesungguhnya adalah karena

perbedaan antara Presiden dengan wakilnya, yang sebelumnya sangat bertentangan baik dalam suku asal maupun partai politik (BBC 2019). Pada akhirnya, konflik sipil terjadi tidak lama setelah Sudan Selatan merdeka, menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya semakin menurun.

3.2.1 Ketidakmampuan Pemerintah dalam memenuhi ‘*political goods*’

Menurut Rotberg, pemerintah harus dapat memenuhi ‘*political goods*’ untuk dapat mendapatkan legitimasi dari masyarakatnya. *Political goods* itu sendiri menurut tulisan Rotberg, berkaitan dengan bagaimana pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakatnya. Rasa aman tersebut dapat diberikan dengan memastikan hak rakyatnya terpenuhi, misalnya dengan membangun infrastruktur dan fasilitas negara yang dapat mempermudah masyarakat, memberikan kebebasan terhadap masyarakat, serta melindungi masyarakat dari segala ancaman. Sejak kemerdekaannya, pemerintah Sudan Selatan nyatanya tidak dapat memberikan hal-hal tersebut. Meskipun memiliki anggaran, pemerintah tetap gagal untuk menyisihkan anggarannya untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan dasar untuk masyarakatnya. Layanan seperti layanan pendidikan dan layanan kesehatan yang sudah menjadi hak bagi semua orang untuk disediakan oleh pemerintah, bahkan tidak berjalan karena kurangnya investasi dan usaha pemerintah untuk memenuhi hal tersebut. Sampai tahun 2021, lebih dari 4.8 juta anak tidak bersekolah karena keterbatasan akses dan penyediaan kesempatan pendidikan (Tut Pur and Aufiero 2021). Sekitar sepertiga sekolah di Sudan Selatan telah hancur akibat serangan yang sebelumnya dilakukan oleh kelompok bersenjata. Hal ini diperparah dengan adanya

penutupan sekolah akibat Covid - 19 (UNICEF 2021).

3.2.2 Hilangnya Legitimasi Pemerintahan

Pada tahun 2013, konflik sipil yang terjadi antara presiden dan wakilnya memperburuk keadaan dan legitimasi pemerintahan. Pada dasarnya, fondasi pemerintahan Sudan Selatan mungkin memang sudah rapuh sejak awal, mengingat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara Kiir dengan Machar. Namun, kenyataannya tidak ada usaha dari pemerintah untuk memberikan keamanan bagi masyarakat. Kekerasan antarkomunitas masih terus meningkat, mengakibatkan ratusan ribu orang terbunuh (World Bank 2022). Para pemimpin politik dan militer juga tidak dapat menghentikan perang, namun justru mereka menambah kekerasan dengan memasok senjata ke masyarakat.

**Gambar 1. Jumlah Korban Jiwa Akibat Perang di Sudan Selatan
Tahun 2011-2021**



Sumber : World Bank (2022)

Tidak hanya kebutuhan dasar, masyarakat juga semakin dipersulit dalam kebebasan berpendapat. Mereka yang mempertanyakan otoritas pemerintah dan ikut protes dalam urusan pemerintahan akan dibungkam. Tidak sedikit jurnalis dan aktivis yang diserang dan ditahan oleh pemerintah bahkan sampai saat ini. Pada 2021 lalu, polisi masih menangkap masyarakat yang memprotes keadaan jalanan umum dan layanan kesehatan yang tidak layak (Tut Pur and Aufiero 2021). Pemerintah yang baik seharusnya dapat mencukupi aspek-aspek dasar masyarakatnya tersebut. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, kemungkinan besar pemerintah akan kehilangan legitimasi (Rotberg 2003). Hilangnya legitimasi pemerintahan nantinya akan berujung pada kegagalan karena berarti masyarakat sudah tidak lagi percaya pada Presiden dan pemerintahnya. Pada dasarnya, negara cenderung akan lebih kuat apabila rakyatnya dapat mengakui bahwa presiden merupakan otoritas tertinggi negara. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggungjawab besar untuk mengatasi berbagai macam serangan baik dari luar atau dari dalam demi melindungi masyarakatnya,

Secara politik, Sudan Selatan jelas masih berada di tahap yang belum stabil. Konflik sipil antar pemerintah tahun 2013 yang menewaskan jutaan orang pada kenyataannya telah membuktikan bahwa pemerintah Sudan Selatan masih belum bisa memberikan perlindungan dan keamanan untuk masyarakatnya (World Bank 2022). Konflik ini terus terjadi secara berkepanjangan, meskipun sudah ada upaya perdamaian yang diinisiasi oleh IGAD di tahun 2014, namun pemberontakan antara pemerintah dengan SPLM-IO kembali terjadi di tahun 2016. Dalam hal ini,

masyarakat secara terus menerus dijadikan sebagai korban. Belum lagi maraknya korupsi yang dilakukan oleh para elit politik di pemerintahan. Uang yang seharusnya dapat digunakan untuk membantu rakyatnya, justru diambil dan digunakan sendiri, membuktikan bahwa rakyat tidak bisa mempercayai pemerintahnya lagi dan pada akhirnya pemerintah Sudan Selatan kehilangan legitimasi (Holland 2012).

3.2.3 Institusi Pemerintahan Cacat

Pada saat Presiden Salva Kiir mendengar rumor bahwa wakil presiden Riek Machar akan melakukan kudeta terhadap pemerintahannya, Kiir merasa posisinya terancam. Mendengar hal tersebut, ia akhirnya memutuskan untuk menanata kembali kepemimpinan senior pemerintahan, partai, dan militernya. Di awal tahun 2013, Kiir memberhentikan sekitar 29 mayor jenderal di angkatan darat dan mengganti inspektur jenderal kepolisian nasional. Setelahnya, di bulan Juli 2013, Kiir resmi memberhentikan peran Riek Machar sebagai wakil presiden beserta dengan seluruh.kabinetnya yang terdiri dari menteri dan wakil menteri (Sudan Tribune 2013). Adanya pemecatan besar-besaran tersebut memberikan pengaruh besar terhadap kestabilan pemerintahan. Penggantian yang dilakukan Kiir tersebut bahkan dianggap oleh Machar sebagai upaya kediktatoran (Al Jazeera 2013). Setelah diberhentikan, Machar melakukan protes dengan memisahkan diri dari SPLM pemerintah dan membentuk SPLM-IO untuk menyerang pemerintah. Sejak itu, keduanya saling merebut kekuasaan, menelantarkan negara dan pemerintahannya untuk saling menyerang (BBC 2013).

Hal-hal seperti kurangnya kinerja pemerintah dalam mengurus negaranya dan

pemerintah yang tidak lagi memiliki kontribusi untuk negara, merupakan hal-hal yang dapat membuat masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintahnya. Apabila masyarakat sudah tidak lagi mengakui legitimasi dan mempercayai pemerintah yang dapat melindungi mereka, maka negara tersebut akan menjadi negara lemah karena hal tersebut berarti pemerintah tidak dapat memberikan kinerja terbaiknya untuk membangun negara. Pada dasarnya, untuk memperkuat stabilitas dan keamanan negara, dibutuhkan usaha dari pemerintah dan masyarakatnya juga. Melihat situasi politik di Sudan Selatan, nyatanya pemerintah juga masih belum bisa memberikan kebutuhan dasar bagi negaranya dan masyarakatnya. Dalam hal ini, pemerintah masih terlalu fokus untuk merebut kekuasaan untuk saling mendominasi tanpa menunjukkan kepeduliannya untuk setidaknya memperbaiki pemerintahannya dengan memberikan fasilitas yang lebih baik untuk masyarakatnya. Hal tersebut tentunya akan berujung ke pemerintahan negara yang tidak lagi memiliki legitimasi di mata masyarakat. Faktor ini pada akhirnya menjadi penting dalam mendukung indikator politik yang menjelaskan penyebab kegagalan Sudan Selatan.

3.3 Intensitas Kekerasan

Salah satu indikator penting yang ditekankan oleh Rotberg dalam menganalisis penyebab kegagalan negara adalah seberapa besar intensitas kekerasan yang terjadi di negara tersebut. Dalam hal ini, perang sipil yang berkelanjutan, maraknya kekerasan, adanya pemberontakan melawan pemerintahan, juga meningkatnya angka kejahatan merupakan beberapa hal yang mendukung indikator tersebut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait dengan sejarah Sudan Selatan, dapat dipastikan bahwa masalah

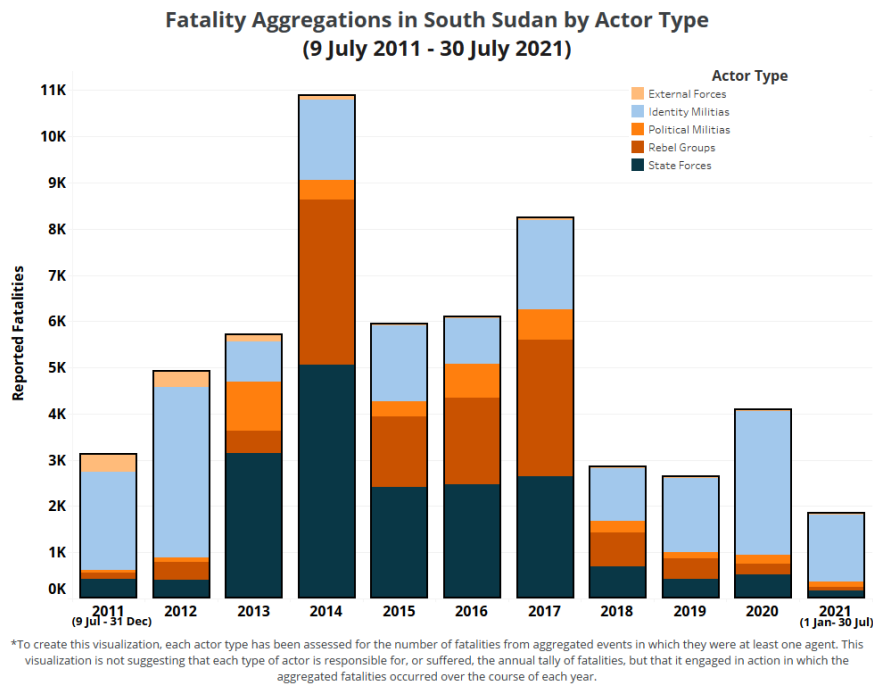
konflik sipil di Sudan Selatan sudah terjadi bahkan sejak sebelum merdeka. Belum lama pulih, dua tahun setelah negaranya merdeka, kembali terjadi konflik sipil berkelanjutan yang terjadi dengan melibatkan presiden dan wakilnya. Perang sipil ini bahkan sudah menewaskan lebih dari 400 ribu orang meninggal (The New York Times 2023). Masalah utama yang menjadi akar dari permasalahan ini adalah masalah etnis, yang melibatkan Suku Dinka dan Suku Nuer, keduanya adalah suku dengan populasi terbanyak di Sudan Selatan yang memang sudah tidak akur sejak dulu. Adanya pertikaian di ranah pemerintahan tersebut mendukung adanya perluasan konflik yang lama kelamaan meluas ke masyarakat juga. Melihat presiden dan wakilnya yang saling berperang, masyarakatnya pun ikut memerangi satu sama lain dengan mendukung sukunya masing-masing.

3.3.1 Perang sipil berkelanjutan yang berakar dari masalah etnis, agama, atau antarkomunal

Di tahun 2016, setelah terdapat pembentukan pemerintahan baru, Machar kembali ke Juba dan kembali menjadi wakil presiden. Namun di bulan Juli, konflik berlanjut dan Machar kembali ke pengasingan. Selagi konflik masih berlanjut, PBB menyuarakan protesnya akan adanya pembersihan etnis atau genosida yang sedang berlangsung di beberapa bagian negara di Sudan Selatan. Di tahun 2018, penandatanganan perjanjian *the Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan* (R-ARCSS) kembali dilakukan dengan adanya persetujuan dari Presiden Kiir yang akan membagi kekuasaannya dengan Riek Machar dan

kelompok oposisi lainnya dalam upaya untuk mengakhiri perang saudara. Kesepakatan ini akan kembali membuat Machar menjadi wakil presiden. Setelah perjanjian ini disepakati, konflik dan kekerasan akibat perang saudara di Sudan Selatan tidak juga menurun.

Gambar 2. Agregasi Kematian di Sudan Selatan berdasarkan Jenis Aktor



Sumber : The Armed Conflict Location & Event Data Project (2021)

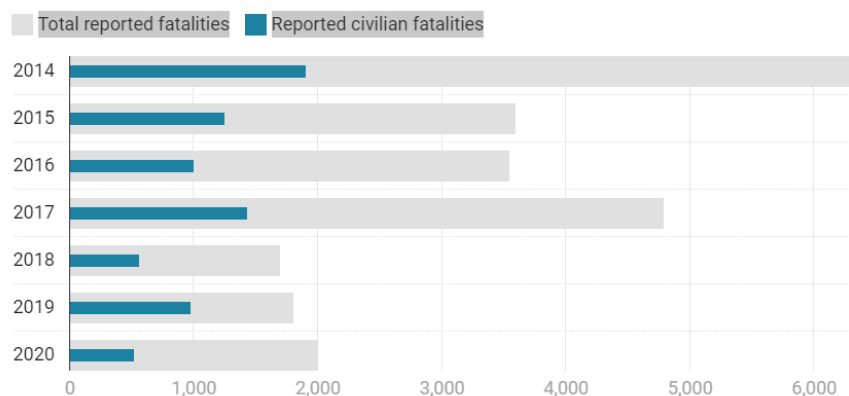
Berdasarkan laporan dari ACLED, kekerasan setelah penandatanganan perjanjian R-ARCSS mulai mengalami penurunan, namun jumlahnya masih terhitung banyak. Wilayah-wilayah seperti negara bagian Warrap, Lakes, dan Jonglei merupakan beberapa wilayah yang terkena dampak kekerasan paling parah. Tidak hanya itu, kekerasan juga meningkat di wilayah Greater Equatoria di selatan dan di

negara bagian Unity dan Upper Nile di utara. Sebagian besar dari kerusuhan tersebut bersifat komunal dan terjadi antar-etnis (Dan Watson 2021).

3.3.2 Maraknya Pertempuran dan Kekerasan Massal

Pada dasarnya, kekerasan yang terjadi di Sudan Selatan memiliki dinamika yang berbeda-beda, dengan beberapa terkait erat dengan faksi politik dan militer Sudan Selatan. Selain itu, beberapa konflik ini juga diinisiasi oleh para kaum elit di Sudan Selatan, meskipun pembunuhan yang ditargetkan terkait dengan peristiwa ini terus dikaitkan dengan orang-orang bersenjata yang tak dikenal dan bersifat acak. Alasan utama terjadinya konflik di Sudan Selatan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu serangan balas dendam etnis, perebutan otoritas subnasional, dan perang proksi elit (Watson 2021).

Gambar 3. Tingkat Kematian Warga Sipil akibat Konflik Bersenjata dan Kekerasan



Data for 2020 runs only from January through September

Sumber : Stimson Center (2020)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa puncak terjadinya kekerasan terhadap masyarakat sipil terjadi di tahun 2014, dimana puncak konflik terjadi. Setelah adanya penandatanganan perjanjian damai di tahun 2018, grafik kekerasan menurun, namun jumlahnya masih terhitung banyak. Di tahun-tahun selanjutnya pun jumlah kekerasan masih terus meningkat.

3.3.3 Pemberontakan Bersenjata melawan Pasukan Pemerintah

Dampak dari adanya pertikaian antara presiden dan wakilnya dalam hal ini menjadi faktor utama konflik masih terus terjadi bahkan setelah penandatanganan perjanjian. Di setiap konflik komunal yang terjadi, kebanyakan merupakan akibat dari urusan yang belum selesai dari perang saudara sebelumnya, yang mana perang tersebut memang cenderung memberikan persaingan abadi antarmasyarakat. Selain itu, berkembangnya faksi-faksi elit politik Sudan Selatan juga mendukung maraknya persaingan antara elit politik Sudan Selatan. Perjanjian perdamaian di Sudan Selatan biasanya mengatur ulang kekuasaan daripada mengubah fungsinya, dan mencerminkan prioritas elit militer Sudan Selatan bersama tetangga negara dan mitra eksternal sementara sebagian besar mengabaikan penduduk sipilnya (Stimson Center 2020).

Selain itu, perjanjian ini juga memberikan keunggulan kepada faksi militer dan elit militer untuk memperluas pengaruh politik mereka dan berbagi sumber daya ekonomi dengan mengorbankan kelompok yang terkucilkan (Stimson Center 2020). Maka dari itu, perjanjian damai disini justru juga dapat meningkatkan kondisi untuk

saling merebut kekuasaan dan kekayaan. Salah satu faktor utama terjadinya pemberontakan terhadap pemerintah biasanya diinisiasi oleh SPLM-IO yang diketuai oleh Riek Machar. Pada tahun 2018, SPLM-IO bahkan mendirikan pemerintahannya sendiri yang bermarkas di Upper Nile, sebagai bentuk persaingan terhadap pemerintah di Juba (Martell 2019). Pada dasarnya, ideologi partai ini memiliki ideologi yang sama dengan pemerintah, namun yang membedakan adalah partai ini dibuat sebagai perwakilan dari suku Nuer.

3.3.4 Meningkatnya Angka Kejahatan

Pada masa paruh pertama tahun 2020, peristiwa kekerasan di Sudan Selatan mengalami kelonjakan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa jumlah korban mengalami peningkatan semenjak pecahnya perang saudara di Sudan Selatan. Kematian warga disini diakibatkan oleh konflik bersenjata dan kekerasan yang terjadi. UNMISS di pertengahan tahun 2020 sempat melaporkan bahwa kekerasan antarkomunitas memiliki pertanggungjawaban atas 86% kejahatan sipil yang terjadi. Angka ini meningkat 11% dari awal tahun. Daerah sekitar negara bagian Jonglei, Lakes, dan Warrap merupakan wilayah yang paling terdampak saat itu (Gregory 2020).

Selain itu, UNSG juga melaporkan bahwa pada awal maret, ada lebih dari 35 ribu warga sipil yang mengungsi akibat dari kekerasan komunal di daerah Central Equatoria, Jonglei, Pibor Raya, Lakes, Unity, Bahr el-Ghazal bagian barat, dan Warrap. Kekerasan yang terus menerus terjadi mengakibatkan kematian dan juga cedera fisik bagi masyarakat sipil. Kasus penculikan dan kekerasan seksual juga menjadi masalah

utama yang menimpa anak-anak dan perempuan. Mereka juga harus menghadapi dampak sekunder yang lebih besar dari laki-laki, terutama karena berkurangnya akses pendidikan, perawatan kesehatan, dan kegiatan mata pencaharian (Gregory 2020). Di tahun-tahun berikutnya, sampai pada akhir tahun 2022, jumlah warga sipil yang terkena dampak kekerasan di Sudan Selatan tidak juga menurun, justru sebaliknya, angka tersebut malah meningkat tajam jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari bulan Oktober sampai Desember 2022, jumlah warga sipil yang dirugikan bahkan meningkat sampai 87 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, kasus penculikan juga meningkat sampai 464 persen dan kekerasan seksual juga meningkat hingga 360 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Kasus kekerasan yang terjadi dalam tiga bulan terakhir tersebut terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu seperti wilayah Nil Atas, Warrap, dan Jonglei. Sekitar 53 persen jumlah korban sipil berasal dari konflik antara Pasukan Agwelek dan kelompok Kitgwan dan milisi bersenjata sekutu masing-masing di wilayah Greater Upper Nile. Banyak warga sipil juga terkena kekerasan antarkomunal di negara bagian Warrap, Jonglei, dan Equatoria Timur. Alasan dan faktor masih maraknya konflik terjadi bahkan bertahun-tahun setelah perjanjian damai ditandatangani ialah karena masih maraknya ketegangan antar komunitas yang masih menghantui masyarakat. Selain itu, ditambah pula dengan adanya masalah iklim, kerawanan pangan, devaluasi mata uang lokal, gangguan mata pencaharian, dan juga konflik kecil terkait dengan ternak warga yang juga memperluas ketegangan di antara masyarakat (UNMISS 2023).

Dari analisis tersebut, dapat terlihat bahwa intensitas kekerasan di Sudan Selatan masih dapat dianggap tinggi. Meskipun beberapa upaya perjanjian damai sudah dilakukan, namun pada kenyataannya konflik masih terus terjadi. Adanya konflik etnis yang menjadi masalah utama adanya tindak kekerasan yang terus menerus menimpa masyarakat di Sudan Selatan menjelaskan alasan mengapa Sudan Selatan masih dianggap sebagai negara yang gagal.

BAB VI

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Merdekanya Sudan Selatan dari Sudan awalnya merupakan perayaan yang sebelumnya sudah diimpikan oleh masyarakat. Sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 2011, Sudan Selatan beserta masyarakatnya memiliki harapan tinggi untuk dapat menjadi negara yang lebih merdeka daripada sebelumnya saat mereka masih bersatu dengan Sudan. Meskipun begitu, pada kenyataannya perayaan ini tidak berlangsung lama karena dua tahun setelah merdeka, terjadi konflik sipil di Sudan Selatan. Konflik sipil yang terjadi ini merupakan hal utama yang berperan penting dalam menentukan masa depan Sudan Selatan. Hal ini dikarenakan konflik yang terjadi selama bertahun-tahun tersebut pada akhirnya memberikan Sudan Selatan dampak besar bagi negaranya yang masih sangat baru.

Konflik sipil yang terjadi karena ulah pemerintah berakibat pada kerusakan satu negara. Pertikaian antara Presiden Kiir dengan wakil presiden Machar memiliki akar permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan etnis, meskipun awal mula konflik terjadi tidak ada kaitannya dengan etnis. Namun, pada dasarnya, keduanya memang telah memiliki hubungan yang rapuh terutama karena suku Dinka dan Nuer tidak memiliki sejarah yang baik sejak awal. Keputusan Presiden Kiir untuk memecat Machar pada dasarnya yang membuat kedua belah pihak saling serang, diikuti oleh konflik etnis. Di sisi lain dapat dikatakan bahwa konflik sipil ini merupakan penyebab

utama Sudan Selatan mengalami kegagalan.

Secara garis besar, sejarah Sudan Selatan pada dasarnya berperan penting dalam keadaan negaranya sampai saat ini. Akar masalah yang selalu berkaitan dengan konflik etnis membuat masalah negara tersebut tidak pernah selesai dan pertikaian selalu terjadi. Meskipun begitu, tentunya masih ada indikator lain yang membuat Sudan Selatan dikategorikan sebagai negara yang gagal. Penelitian ini pada dasarnya ingin memberikan analisis lebih lanjut terkait dengan penyebab apa saja yang membawa Sudan Selatan menjadi negara yang gagal. Melalui analisis *failed states* yang ditulis oleh Rotberg, pada dasarnya teori ini menjelaskan bahwa ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk melihat hal-hal apa saja yang dapat membawa suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang lemah, gagal, dan runtuh. Indikator tersebut dapat dilihat dengan mengkategorikan kondisinya menjadi 3, yaitu indikator ekonomi, politik, dan seberapa besar intensitas kekerasan yang terjadi. Rotberg percaya bahwa dengan menganalisis ketiga indikator tersebut, maka kategori negara yang lemah, gagal, dan runtuh akan lebih mudah teridentifikasi.

Setelah teori tersebut diaplikasikan ke kondisi di Sudan Selatan, dapat terlihat bahwa kondisinya memang menjelaskan bahwa Sudan Selatan adalah negara yang gagal. Dilihat dari segi ekonominya, Sudan Selatan masih memiliki kondisi ekonomi yang cenderung rapuh dan terlihat masih belum bisa pulih terutama setelah konflik terjadi. Hal ini dapat dilihat karena adanya inflasi meningkat, cadangan mata uang yang menurun, jatuhnya PDB per kapita, maraknya kasus korupsi, dan juga adanya ketidaksetaraan ekonomi. Tidak hanya itu, pemerintahan Sudan Selatan juga

menunjukkan ketidakmampuannya dalam memenuhi ‘*political goods*’ yang pada akhirnya mempengaruhi legitimasi negara yang semakin menghilang karena institusi pemerintahannya yang cacat. Selain dari kedua indikator tersebut, tingginya intensitas kekerasan pun juga memiliki pengaruh besar dalam kegagalan negara. Maraknya perang sipil berkelanjutan yang berakar dari masalah antarkomunal, maraknya pertempuran, pemberontakan bersenjata yang melawan pemerintah, juga meningkatnya angka kejahatan, merupakan hal-hal yang mendukung kegagalan negara Sudan Selatan. Pada dasarnya, apabila ketiga indikator tersebut semuanya terjadi dalam satu waktu di suatu negara, maka berdasarkan teori Robert Rotberg, negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara yang gagal. Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa indikator kondisi ekonomi, politik, dan besarnya intensitas kekerasan yang ada di Sudan Selatan dapat menjelaskan penyebab kegagalan Sudan Selatan sampai saat ini.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Fokus penelitian ini pada dasarnya membahas terkait dengan penyebab kegagalan Sudan Selatan dengan memperhatikan kondisi Sudan Selatan tahun 2013-2022 dari indikator ekonomi, politik, dan intensitas kekerasan. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dari masa puncak konflik sipil terjadi, sampai setelah perjanjian perdamaian ditandatangani. Di sisi lain, penelitian ini juga difokuskan untuk melihat kondisi masyarakatnya sebelum dan setelah konflik sipil.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan, masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, terutama karena pembahasannya yang hanya fokus terhadap kondisi Sudan Selatan dan pemerintahannya. Maka dari itu, terdapat saran dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk penelitian berikutnya, yaitu penelitian terkait dengan kondisi Sudan Selatan yang saat ini sudah memulai kembali produksi minyaknya. Produksi minyak di Sudan Selatan awalnya dianggap sebagai potensi utama yang dapat membawa Sudan Selatan untuk maju, namun karena adanya konflik sipil membuat produksinya terhenti. Meskipun begitu, saat ini produksinya mulai dibuka kembali. Maka dari itu, penelitian berikutnya dapat menganalisis apakah produksi minyak di Sudan Selatan benar dapat memajukan Sudan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Cahyanti, Putri. 2017. "Analisis Konflik Sudan Dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan." *Journal of International Relations* 3: 84–95.
- Kindersley, Nicki, and Øystein H. Rolandsen. "Who are the civilians in the wars of South Sudan?." *Security Dialogue* 50, no. 5 (2019): 383-397.
- Maru, Mehari. 2016. "Potential Causes, Consequences of S. Sudan Becoming a 'Failed State.' *Horn Affairs*.
- Okeke, Remi Chukwudi, Adeline Nnenna Idike, Azalahu Francis Akwara, Corneliu O. Okorie, and Okechukwu E. Ibiam. 2021. "Failure of States, Fragility of States, and the Prospects of Peace in South Sudan."
- Rotberg, Robert I. 2003. "Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators." *ResearchGate*.
- Rolandsen, Øystein H. 2015. "Another Civil War in South Sudan: The Failure of Guerrilla Government?" *Journal of Eastern African Studies*.
- Smith, Stephen W. 2011. "Sudan: In a Procrustean Bed with Crisis", *International Negotiation*.

Buku

Arnold, Matthew, and Matthew LeRiche. 2013. "South Sudan : From Revolution to Independence." Oxford University. 2013.

Anselm Strauss dan Juliet Corbin. 1997. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Tehnik, dan Teori. Surabaya: Bina Ilmu Offset.

Johnson, Hilde. 2013. "South Sudan: The Untold Story from Independence to Civil War."

Marshall, Gordon, and John Scott, eds. 2009. "A dictionary of sociology."

Martell, Peter. 2019. "First Raise a Flag: How South Sudan Won the Longest War but Lost the Peace." Oxford University Press. 2019.

Poggo, Scopas. 2009. "The First Sudanese Civil War Africans, Arabs, and Israelis in the Southern Sudan, 1955–1972."

Pinaud, C. 2014. "South Sudan: Civil War, Predation and the Making of a Military Aristocracy." *African Affairs* 113 (451): 192–211.

Laporan

Dr. Dan Watson. 2021. "Surface Tension: 'Communal' Violence and Elite Ambitions in South Sudan." ACLED. August 19, 2021.

<https://acleddata.com/2021/08/19/surface-tension-communal-violence-and-elite-ambitions-in-south-sudan/>.

Fragile States Index. 2022. "Country Dashboard | Fragile States Index." Fragilestatesindex.org. 2022. <https://fragilestatesindex.org/country-data/>.

FAO. 2023. “FAO - News Article: South Sudan Naturally Endowed for Sustainable Growth through Agriculture.” Fao.org. 2023.

<https://www.fao.org/news/story/en/item/81693/icode/>.

Gregory, July. 2020. “Data Overview: Violence against Civilians in South Sudan • Stimson Center.” Stimson Center. October 13, 2020.

<https://www.stimson.org/2020/data-overview-violence-against-civilians-in-south-sudan/>.

IPC. 2022. “South Sudan: Acute Food Insecurity and Acute Malnutrition Situation for February - March 2022 and Projections for April - July 2022 | IPC - Integrated Food Security Phase Classification.” Ipcinfo.org. 2022.

<https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/es/c/1155527/>.

IMF. 2019. “Republic of South Sudan and the IMF.” IMF. March 8, 2019.

<https://www.imf.org/en/Countries/SSD#countrydata>.

OCHA. 2022. “Checkpoint Economy: The Political Economy of Checkpoints in South Sudan, Ten Years after Independence (December 2021) - South Sudan.”

ReliefWeb. April 19, 2022. <https://reliefweb.int/report/south-sudan/checkpoint-economy-political-economy-checkpoints-south-sudan-ten-years-after>

Stimson Center. 2020. “Data Overview: Violence against Civilians in South Sudan • Stimson Center.” Stimson Center. October 13, 2020.

<https://www.stimson.org/2020/data-overview-violence-against-civilians-in-south-sudan/>.

Transparency International. 2023. "2022 Corruption Perceptions Index - Explore South Sudan's Results." Transparency.org. January 31, 2023.

<https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/ssd>.

UNICEF. 2021. "Major Developments, July -September 2021." *UNICEF*.

https://www.unicef.org/southsudan/media/7946/file/Education%20Briefing%20Note_2021%20Q1%20FINAL.pdf.

World Bank. 2019. "Population, Total - South Sudan | Data." Worldbank.org. 2019.

<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=SS>

World Bank. 2022. "GDP per Capita (Current US\$) | Data." Worldbank.org. 2022.

<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2021&start=2021&view=bar>.

Artikel Daring

AFP. 2020. "South Sudan Runs out of Foreign Exchange Reserves as Pound Falls."

The East African. The East African. August 20, 2020.

<https://www.theeastafrican.co.ke/tea/business/south-sudan-currency-tumbles-1922728>.

Bahati, Linnete. 2016. "South Sudan's Inflation Rate Skyrockets to More than 600

Percent." Africanews. Africanews. September 7, 2016.

<https://www.africanews.com/2016/09/07/south-sudan-s-inflation-rate-skyrockets-to-more-than-600-percent/#:~:text=South%20Sudan's%20National%20Bureau%20of,annual%20rate%20of%20661.3%20percent>.

BBC. 2018. "South Sudan Country Profile." BBC News. BBC News. August 6, 2018.

<https://www.bbc.com/news/world-africa-14069082>.

Dumo, Denis. 2019. "South Sudan Makes Minor Oil Discovery, First since Independence." U.S. August 22, 2019. <https://www.reuters.com/article/us-south-sudan-oil-idUSKCN1VC1WI>.

Francois Sennesael, and Harry Verhoeven. 2023. "South Sudan's Oil and Water Give It Bargaining Power – but Will It Benefit the People?" The Conversation. February 12, 2023. <https://theconversation.com/south-sudans-oil-and-water-give-it-bargaining-power-but-will-it-benefit-the-people-197725#:~:text=Oil%20accounts%20for%20up%20to,to%20170%2C000%20barrels%20a%20day>

Hackett, Mark. 2019. "Operation Broken Silence." Operation Broken Silence. September 30, 2019. <https://operationbrokensilence.org/blog/sudans-independence-to-civil-war>.

Holland, Hereward. 2012. "South Sudan Officials Have Stolen \$4 Billion: President." U.S. June 4, 2012. <https://www.reuters.com/article/us-southsudan-corruption-idUSBRE8530QI20120604>.

Irwin-Hunt, Alex, and Munyaradzi Makoni. 2022. "The Promise of Oil and Gas in South Sudan." Fdiintelligence.com. 2022. <https://www.fdiintelligence.com/content/feature/the-promise-of-oil-and-gas-in-south-sudan-81521>.

Mayen, David. 2020. "South Sudan's Currency Loses More Value amid Plans to Change It." The East African. The East African. October 22, 2020.

<https://www.theeastafrican.co.ke/tea/business/south-sudan-currency-loses-more-value--2719168>.

Moszynski, Peter. 2011. "Fears Grow for Minorities in North Sudan If South Votes to Secede." The Guardian. The Guardian. January 8, 2011.

<https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2011/jan/08/south-sudan-referendum-bashir-sharia-law>

Mugabi, Isaac. 2022. "South Sudan's Ruling Elite Probed for \$1B 'Scam.'" Dw.com.

Deutsche Welle. October 11, 2022. <https://www.dw.com/en/south-sudans-ruling-elite-probed-for-1b-scam/a-63373571>.

Oluwole, Victor. 2022. "7 of the Worst Performing Currencies in Africa in 2022."

Business Insider Africa. Business Insider Africa. November 5, 2022. <https://africa.businessinsider.com/local/markets/7-of-the-worst-performing-currencies-in-africa-in-2022/s5kqzk1>.

Spaulding, J. L. , Sikainga, . Ahmad Alawad , Sabr, . Mohy el Din and Collins, .

Robert O.. "South Sudan." Encyclopedia Britannica, June 7, 2019.

<https://www.britannica.com/place/South-Sudan>.

The New York Times. 2018. "383,000: Estimated Death Toll in South Sudan's War 2018.

<https://www.nytimes.com/2018/09/26/world/africa/south-sudan-civil-war-deaths.html>

Tut Pur, Nyagoah , and Paul Aufiero. 2021. "South Sudan at a Crossroads." Human

Rights Watch. July 9, 2021. <https://www.hrw.org/news/2021/07/09/south-sudan-crossroads>.

United Nations Population Fund. 2022. “World Population Dashboard -South Sudan.” United Nations Population Fund. 2022.

<https://www.unfpa.org/data/world-population/SS/>

UNMISS. 2023. “Press Release: Sharp Increase in Violence in South Sudan at the End of 2022, according to Latest UNMISS Quarterly Brief.” UNMISS.

February 16, 2023. <https://unmiss.unmissions.org/press-release-sharp-increase-violence-south-sudan-end-2022-according-latest-unmiss-quarterly-brief>.

VOA News. 2014. “MSF: ‘Alarming’ Number of Deaths at South Sudan Camp.”

VOA. Voice of America (VOA News). June 20, 2014.

<https://www.voanews.com/a/s-sudan-refugee-camps-harsh-conditions-blamed-in-deaths/1941336.html>.